

**REAKSI CHINA TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI
TAIWAN:**

NEW SOUTHBOUND POLICY TAHUN 2016

CHINA'S REACTION TO TAIWAN'S FOREIGN POLICY:

NEW SOUTHBOUND POLICY 2016

SKRIPSI

Oleh:

Rekka Pingkan Putri

NIM 140910101028

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2018



Reaksi China terhadap Kebijakan Luar Negeri Taiwan:

New Southbound Policy Tahun 2016

(China's Reaction to Taiwan's Foreign Policy:

New Southbound Policy 2016)

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar sarjana sosial

Oleh:

REKKA PINGKAN PUTRI

140910101028

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya yang telah Ia limpahkan kepada penulis, sehingga tugas akhir skripsi ini dapat diselesaikan dan dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku dan kakaku yang terus memberikan doa serta dukungan kepada saya untuk menyelesaikan studi mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi;
2. Guru-guruku sejak TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi; dan
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Learn how to see. Realize that everything connects to everything else.

~Leonardo da Vinci~*

Eureka! Eureka!

~Archimedes~**



* Leonardo da Vinci. Tanpa Tahun. Good Reads. Di akses melalui <https://www.goodreads.com/quotes/679908-learn-how-to-see-realize-that-everything-connects-to-everything> 5 Desember 2018

** Archimedes. Tanpa Tahun. Academia Edu. Diakses melalui http://www.academia.edu/23680778/Biografi_Archimedes_-_Penemu_Hukum_Archimedes 05 Desember 2018

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rekka Pingkan Putri

NIM : 140910101028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya skripsi yang berjudul “Reaksi China terhadap Kebijakan Luar Negeri Taiwan: *New Southbound Policy* Tahun 2016” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Desember 2018

Yang menyatakan

Rekka Pingkan Putri

NIM 140910101028

SKRIPSI

**REAKSI CHINA TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI
TAIWAN:**

NEW SOUTHBOUND POLICY TAHUN 2016

CHINA'S REACTION TO TAIWAN'S FOREIGN POLICY:

NEW SOUTHBOUND POLICY 2016

Oleh:

Rekka Pingkan Putri

NIM 140910101028

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Iqbal S.Sos, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota: : Drs. Agung Purwanto, M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Reaksi China Terhadap Kebijakan Luar Negeri Taiwan:
New Southbound Policy Tahun 2016” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Desember 2018
Waktu : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Bersama FISIP Universitas Jember

Tim Penguji,
Ketua

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.

196108281992011001

Sekretaris I

Sekretaris II

Dr. Muhammad Iqbal S.Sos, M.Si.

197212041999031004

Drs. Agung Purwanto, M.Si

196810221993031002

Anggota I

Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si

196105151988021001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M. Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Reaksi China Terhadap Kebijakan Luar Negeri Taiwan: *New Southbound Policy* Tahun 2016: Rekka Pingkan Putri, 140910101028: 2018: 119 halaman: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pasca pemilu presiden Taiwan pada Januari 2016, yang dimenangkan oleh Tsai Ing-wen dari Partai Demokrasi Berkelanjutan menarik perhatian China. Sebelum ini Taiwan dikuasai oleh Partai Nasionalis atau Kuomintang sejak China dan Taiwan berpisah secara diplomatik pada tahun 1949. Namun hubungan China-Taiwan telah di atur dalam Konsensus 1992 yaitu suatu kebijakan yang dikenal sebagai *One China Policy* atau Kebijakan Satu China. Kebijakan ini berisi tentang pengakuan bahwa hanya ada satu China yang utuh dan berdaulat. Selanjutnya, Taiwan berupaya untuk mendekatkan diri terhadap negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia dan New Zealand dengan membentuk suatu kebijakan luar negeri yang disebut *New Southbound Policy* (NSP) atau Kebijakan Menuju Selatan pada tahun 2016. Terdapat 18 negara yang menjadi sasaran dalam NSP yaitu, negara-negara ASEAN, Asia Selatan, Australia serta New Zealand. Dalam kebijakan NSP, Taiwan menjaga dan meningkatkan kerjasamanya dengan negara-negara tujuan NSP khususnya dalam bidang perdagangan. Sehingga membuat China semakin curiga dan merasa terganggu dengan tindakan Taiwan. Dari penjabaran di atas, reaksi China terhadap kebijakan NSP menjadi menarik untuk diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah terhadap gejala atau isu tertentu untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui reaksi China terhadap kebijakan *New Southbound Policy* (NSP). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini diambil dari studi kepustakaan dalam memperoleh data

sekunder. Kemudian penulis menganalisis lalu mendeskripsikan data yang diperoleh untuk menemukan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa reaksi China terhadap kebijakan luar negeri NSP sebagai tindakan atau tingkah laku suatu negara yang didasari oleh interaksi antar kedua wilayah. China melakukan upaya dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik, dan militer. Dalam bidang ekonomi, China memperkuat hubungannya dengan negara-negara mitra OBOR. Dalam bidang politik, China semakin agresif dalam menekan Taiwan dalam hubungan lintas selat. Dalam bidang keamanan, China memperkuat militernya. Apabila militer China sudah kuat maka bisa membalikkan partai Koumintang atau KMT yang dinilai membangkang terhadap wilayah China.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Reaksi China Terhadap Kebijakan Luar Negeri Taiwan: *New Southbound Policy* Tahun 2016”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini didukung oleh bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Muhammad Iqbal S.Sos, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Agung Purwanto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak dan Ibu dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Sahabat dan teman-teman di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember mulai dari angkatan 2011-2014 yang telah menjadi teman dalam berbagi dan diskusi dalam penyelesaian skripsi ini; dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang bermanfaat.

Jember, 4 Desember 2018

Penulis

DAFTAR TABEL

2.1 Timeline Peristiwa Taiwan Pasca Berpisah dengan Kepulauan China	22
2.2 Timeline Peristiwa Era Ekonomi China	34
3.1 <i>Flows of Inward Foreign Direct Investment (FDI) by Host Country and Source Country</i>	56
3.2 <i>Nationals registered to work abroad in Taiwan in 2014</i>	57
3.3 Kebijakan Taiwan dalam Bidang Ekonomi	59
3.4 FDI China Tahun 2014-2016	66
3.5 Peringkat Kekuatan Militer di Dunia	76
3.6 Ekspor Senjata Dan Amunisi Taiwan Tahun 2014	78

DAFTAR GAMBAR

1.1 Empat Strategi Kebijakan Luar Negeri	9
2.1 Peta Wilayah Geografis Taiwan.....	20
2.2 Peta Wilayah Geografis China.....	24
3.1 Ekspor Taiwan pada tahun 2016.....	53
3.2 Impor Taiwan pada tahun 2016.....	54
3.3 Impor Dan Ekspor Barang oleh Negara dan Wilayah Utama dan Tingkat Pertumbuhan pada tahun 2017	62
3.4 Hubungan Perdagangan dan Investasi Australia dengan China.....	63
3.5 10 Barang Utama Ekspor ke Australia dan 10 Barang Utama Impor dari Australia pada tahun 2017.....	65
3.6 Total Migran China di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2000-2017	67
4.1 Peringkat Negara dengan Ekonomi Terbesar di Dunia.....	85
4.2 Peta <i>Silk Road Economic Belt</i> dan <i>Maritime Silk Road</i> oleh China.....	90
4.3 Taiwan's Exports to Mainland China and NSP Target Countries.....	92
4.4 Perdagangan China-Taiwan pada tahun 1999-2017	94

DAFTAR SINGKATAN

ACFTA	: <i>ASEAN-China Free Trade Agreement</i>
ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
AEC	: <i>ASEAN Economic Community</i>
AIT	: <i>American Institute in Taiwan</i>
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
ASEAN	: <i>Association of South East Asia Nations</i>
BRI	: <i>Belt dan Road Initiative</i>
CCAA	: <i>China's Civil Aviation Authority</i>
ChAFTA	: <i>China–Australia Free Trade Agreement</i>
CSIS	: <i>Center for Strategic and International Studies</i>
DPP	: <i>Democratic Progressive Party</i>
ECFA	: <i>Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
FITIS	: <i>Federation of Information Technology Industry</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
ICDF	: <i>International Cooperation and Development Fund</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
KMT	: <i>Koumintang</i>
KTT	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>



MOEA	: <i>Ministry of Economic Affairs</i>
NSP	: <i>New Southbound Policy</i>
OBOR	: <i>One Belt One Road</i>
ODA	: <i>Official Development Assistance</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OTN	: <i>Office of Trade Negotiations</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PKC	: <i>Partai Komunis China</i>
PLA	: <i>People's Liberation Army</i>
RCEP	: <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
ROC	: <i>Republic Of China</i>
RRC	: <i>Republik Rakyat China</i>
SAARC	: <i>South Asian Association for Regional Cooperation</i>
TAITRA	: <i>Taiwan External Trade Development Council</i>
TAEF	: <i>Taiwan-Asia Exchange Foundation</i>
TBA	: <i>Taiwanese Business Associations</i>
TECRO	: <i>Taipei Economic and Cultural Representative Office</i>
TETO	: <i>Taipei Economic and Trade Office</i>
TPP	: <i>Trans-Pacific Partnership</i>
TRA	: <i>Taiwan Relations Act</i>
TWD	: <i>Taiwan Dollar</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN.....	v
LEMBAR BIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1 Batasan Materi.....	6
1.2.2 Batasan Waktu.....	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.5.1 Konsep Politik Luar Negeri dalam Perspektif Realisme.....	7
1.6 Argumen Utama	13
1.7 Metode Penelitian	13

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data 14

1.7.2 Teknik Analisis Data 14

1.8 Sistematika Penulisan 14

BAB II. DINAMIKA HUBUNGAN NEGARA CHINA-TAIWAN

2.1 Dinamika Hubungan Negara China-Taiwan

tahun 1911-1949..... 16

2.1.1 Berdirinya Republik China tahun 1911 16

2.1.2 Kebangkitan Komunis (1927-1936) 17

2.1.3 Invasi Jepang (1936-1945)..... 19

2.1.4 Perang Sipil: Lahirnya RRC (1945-1949) 20

2.2 Dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan

tahun 1949-1971 22

2.3 Era *One China Policy* tahun 1971-1985 24

2.3.1 Terbentuknya *One China Policy* 24

2.3.2 Hubungan Negara Amerika Serikat-Taiwan 27

2.3.3 Hubungan Negara Amerika Serikat-China..... 30

2.4 Era Ekonomi China..... 32

BAB III. KEBIJAKAN LUAR NEGERI TAIWAN: *NEW*

***SOUTHBOUND POLICY* (NSP)**

3.1 *New Southbound Policy* 37

3.1.1 Definisi *New Southbound Policy* 43

3.1.2 Tujuan *New Southbound Policy* 44

3.1.3 Prinsip-prinsip <i>New Southbound Policy</i>	47
3.2 Kepentingan Ekonomi Taiwan di Negara Mitra <i>NSP</i>	51
3.2.1 Kepentingan Ekonomi China di Negara Mitra <i>NSP</i>	62
3.2.2 <i>Belt dan Road Initiative</i> (BRI)	68
3.3 Kepentingan Politik Taiwan di Negara Mitra <i>NSP</i>	69
3.3.1 Taiwan-Indonesia	71
3.3.2 Taiwan-Australia	72
3.3.3 Taiwan-Selandia Baru	72
3.3.4 Taiwan-India	73
3.4 Kepentingan Militer Taiwan di Negara Mitra <i>NSP</i>	75
BAB IV. REAKSI CHINA TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI	
TAIWAN: <i>NEW SOUTHBOUND POLICY</i> (NSP)	
4.1 Reaksi China di Bidang Ekonomi	85
4.2 Reaksi China di Bidang Politik	96
4.3 Reaksi China di Bidang Militer	101
BAB V. KESIMPULAN	104
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antara China dan Taiwan menarik untuk diteliti dalam studi Ilmu Hubungan Internasional. Salah satu alasan mendasarnya adalah kedua negara saling memiliki klaim atas kedaulatan negara dan kepentingan nasionalnya masing-masing, terutama pasca kemerdekaan Taiwan pada tahun 1949. Demikian pula penelitian skripsi ini penulis memandang objek kajiannya masih mempunyai relevansi penting bagi khasanah studi Hubungan Internasional. Alasannya adalah pada tahun 2016, Taiwan mengeluarkan *New Southbound Policy* (NSP) atau Kebijakan Baru Menuju Selatan sebagai arah dan jalan baru kebijakan politik luar negeri Taiwan.

Sebelum lebih jauh pembahasan mengenai hal tersebut, pada bagian ini penulis paparkan terlebih dahulu sekilas tentang retrospektif atau kronologis masa lalu hubungan antara China dan Taiwan. Setelah itu barulah penulis akan membahas lebih dalam mengenai pentingnya penelitian ini terutama pada posisi kajian untuk mengetahui dan memahami reaksi China atas kebijakan baru Taiwan yang bernama *New Southbound Policy* ini.

Pada tahun 1949, perang tersebut dimenangkan Partai Komunis China yang dipimpin Mao Zedong. Saat itu, Partai Nasionalis atau Koumintang dipimpin oleh Chiang Kai Shek pindah ke pulau Formosa (Taiwan) sedangkan, Partai Komunis China yang berkuasa di Daratan China membentuk Republik Rakyat China (Wicaksono, 2015). Pada tahun 1970an, perkembangan kekuatan militer China menurut pemimpin China dilihat sebagai alat untuk mencapai kepentingan di tengah lingkungan politik yang tidak aman. Perselisihan yang terjadi antara kedua partai besar di China yaitu Partai Komunis China (PKC) dan Partai Nasionalis atau Kuomintang (KMT) membentuk kekuatan militer sebagai upaya dalam memperebutkan kekuasaan, hingga terjadi perang sipil atau sebagai tanda lahirnya RRC.

China memandang persoalan Taiwan sebagai kerangka masalah domestik, yaitu penyatuan kembali provinsinya yang melepaskan diri pada tahun 1949. Setelah China memproklamkan Republik Rakyat China (RRC) dan berdiri sebagai negara, China semakin giat untuk memperluas wilayah kekuasaannya terhadap wilayah-wilayah perbatasan. China berambisi menjadikan dirinya sebagai negara besar.

Sedikit demi sedikit usaha China di bawah kepemimpinan Partai Komunis China (PKC), membuat kemajuan dalam industrialisasi. Pembangunan ekonomi menjadi fokus yang ditekankan oleh pemimpin China demi menciptakan lingkungan ke dalam dan ke luar yang damai. Adanya potensi ancaman dari luar memerlukan peningkatan kekuatan militer. Sebagai negara otoriter, proses modernisasi pertahanan (*arms build-up*) dalam militer China didukung oleh kondisi perekonomian China yang kuat. Sehingga kapabilitas militer memiliki peran penting dalam menjamin keamanan dan keberlanjutan ekonomi China.

Persaingan kekuatan di Asia Pasifik semakin nyata, salah satunya masalah lintas Selat Taiwan. Dalam masalah ini, China mengantisipasi adanya intervensi militer asing, yaitu Amerika Serikat. Meskipun pada tahun 1979 saat Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan China, namun pada tahun yang sama Amerika Serikat memberlakukan undang-undang *Taiwan Relations Act* (TRA) dengan Taiwan.

Keterlibatan negara Amerika Serikat memicu ketegangan antara China-Taiwan. Dalam pembentukan *Taiwan Relations Act* (TRA) isinya yaitu jaminan bagi hubungan perdagangan, pertukaran antar masyarakat, serta kelanjutan *transfer* senjata dan teknologi dari AS kepada Taiwan. Melalui TRA, AS terus menjalin hubungan non-formal dengan Taiwan, seperti hubungan perdagangan, kebudayaan dan hubungan non-formal lainnya. Kapabilitas militer Amerika Serikat berada di atas militer China (Prasetya, 2005). China pun semakin agresif dalam menekan Taiwan karena bagi China, perhatian politik luar negeri Taiwan menjadi fokus politik luar negeri China juga.

China memberikan respon terkait penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan. Tetapi, apabila China memaksa reunifikasi dengan Taiwan akan memancing reaksi dari pihak Amerika Serikat. China semakin di uji dalam menjalankan dan melaksanakan pemerintahannya, jika China gagal mempertahankan Taiwan, maka akan memicu pemberontakan di beberapa kawasan lainnya. Lepasnya Taiwan bisa jadi merupakan kelemahan China sedangkan bersatunya Taiwan merupakan kekuatan China (Ross, 2002).

Hingga saat ini, China masih terus mengklaim wilayah atas dasar keamanan nasional dan hak-hak historis yang jelas adalah klaim mereka atas Taiwan. Pada saat itu Taiwan berada di bawah pemerintahan lawannya yaitu, Partai Nasionalis atau Kuomintang (KMT) yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan berlanjut hingga saat ini.

Partai Komunis China yang menguasai wilayah China menerapkan ideologi komunis yang menjadikan seorang pemimpin mengatur berjalannya suatu negara. Pada tahun 2012, Presiden Xi Jinping secara resmi diangkat menjadi Presiden China. Kemudian pada tahun 2016, Xi Jinping dinobatkan sebagai “pemimpin inti” Partai Komunis China. Gelar simbolik itu sejajar dengan pendiri PKC yaitu, Mao Zedong, dan bapak reformasi China yaitu, Deng Xiaoping. Pada bulan Oktober 2017, Xi Jinping kembali ditetapkan sebagai presiden untuk kedua kalinya melalui Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis China dan meneruskan era kepemimpinannya. Kebijakan dagang dan penghapusan batas masa jabatan menjadi dua sesi paling penting dalam pemerintahan China saat ini (CNBC Indonesia, 2018). Kekuasaan presiden China tidak setara dengan kekuasaan kepala eksekutif lainnya. Menghapus batas waktu masa jabatan adalah "perebutan kekuasaan" oleh petahana yang ditentukan untuk membentuk "rezim totaliter." Kekuasaan, tugas dan tanggung jawab presiden China tidak sama dengan yang dipegang oleh presiden negara lain (Center For Strategic & International Studies - CSIS, 2018).

Penulis tertarik untuk meneliti ini karena sebagai satu kesatuan bagian dari wilayah China, pemerintah China mengeluarkan kebijakan *One China Policy* atau “Kebijakan Satu China”. Kebijakan yang dipegang teguh oleh Republik Rakyat China yang menetapkan hanya ada satu China yang berdaulat dan memiliki aspek

legalitas sebagai negara yaitu Republik Rakyat China serta Taiwan adalah bagian dari China. Kebijakan ini merupakan usaha pemerintah China untuk mengurangi gerak diplomasi internasional terhadap Taiwan (McDougall, 2007).

Hubungan China-Taiwan selama ini dikaitkan dengan masalah reunifikasi. Reunifikasi dapat dilakukan dengan damai kecuali jika Taiwan memutuskan untuk merdeka, Taiwan terus menolak upaya reunifikasi dalam jangka waktu yang panjang atau melibatkan intervensi dari kekuatan luar. Dalam perkembangan kebijakan China terhadap Taiwan, belum ada upaya yang signifikan dalam bidang politik. Taiwan menggunakan nama Cina Taiwan atau Cina Taipei dalam keterlibatannya dalam organisasi internasional. Strategi ini memperlihatkan bahwa upaya China untuk mengisolasi Taiwan dalam sistem internasional mengalami hambatan (Djafar, 1996).

Pada tahun 2016, Tsai Ing-wen memenangkan pemilu Presiden Taiwan. Tsai Ing-wen diusung oleh partai yang dipimpinnya yaitu Partai Demokrasi Berkelanjutan atau *Democratic Progressive Party* (DPP). Tsai Ing-wen menjadi Presiden perempuan pertama di Taiwan sejak memisahkan diri dari kepulauan China pada tahun 1949 (CNN Indonesia, 2016). Presiden Tsai Ing-wen memiliki strategi kepemimpinan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah China dan Presiden Taiwan terdahulu. Dalam masa jabatannya saat ini, akan menentukan stabilitas keamanan dan kesejahteraan rakyat Taiwan di masa mendatang. Kebijakan baru yang diusung oleh Presiden Tsai Ing-wen yaitu *New Southbound Policy* atau kebijakan selatan baru (NSP) untuk mengembangkan kerjasama yang luas dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan serta Australia dan New Zealand (Ministry of Foreign Affairs, 2016). Terdapat indikasi bahwa terjadi perubahan karena perbedaan strategi yang ditawarkan oleh Presiden Taiwan yang baru. Kebijakan ini identik untuk mengurangi ketergantungan Taiwan pada negara China seperti pemerintahan presiden Taiwan sebelumnya yaitu, Lee Teng-hui dan Chen Shui-bian (Tanasaldy, 2017).

Dengan ditulisnya penelitian ini, penulis berharap menemukan jawaban terkait dengan reaksi China terhadap kebijakan luar negeri Taiwan: *New Southbound Policy* di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan juga Australia dan

New Zealand. Sikap keras China meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen. Negara China curiga dan mengecam tindakan Presiden Tsai Ing-wen karena dinilai ingin mendorong kemerdekaan resmi melalui kebijakan *New Southbound Policy*. Hal itu tidak bisa ditolerir para pemimpin Partai Komunis China, meski Presiden Tsai Ing-wen mengatakan dirinya ingin mempertahankan status quo¹ dan berkomitmen menjaga perdamaian (CNN Indonesia, 2018).

Hubungan China dan Taiwan saling memberikan berbagai reaksi terkait dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu baik dari sisi China ataupun Taiwan. Dinamika politik antara kedua negara ini semakin memburuk dan curiga satu sama lain.

Penulis mencoba berpegang pada pemahaman bahwa kebijakan luar negeri sangat berpengaruh dari struktur domestik yang tumbuh dalam negara itu sendiri sesuai dengan asumsi dari Holsti. Analisis ini berusaha melihat bagaimana situasi eksternal muncul dan bagaimana struktur domestik merespon hal tersebut. Berangkat dari pemaparan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis akan meneliti lebih dalam lagi mengenai reaksi China terhadap kebijakan luar negeri Taiwan di tahun 2016 kedalam skripsi yang berjudul **“Reaksi China terhadap Kebijakan Luar Negeri Taiwan: New Southbound Policy Tahun 2016”**.

¹ Status quo adalah suatu keadaan yang tidak ada perubahan, penambahan, atau perbaikan. Status quo dalam bidang politik adalah sikap politik dari warga negara yang bertahan pada keadaan saat ini dan berusaha untuk mempertahankan keadaan tersebut.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam sebuah karya tulis ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu batasan materi dan batasan waktu. Ruang lingkup pembahasan diperlukan agar pembahasan suatu fenomena tidak keluar dan meluas dari fokus utama penelitian, dan agar dapat menjadi sebuah karya tulis yang sistematis dan terarah.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup pembahasan sebuah fenomena atau objek yang diteliti, yaitu cakupan materi dan permasalahannya. Sehingga tulisan tersebut sesuai dengan apa yang telah menjadi tema utama seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas. Penulis membatasi materi tulisan ilmiah ini yaitu tentang reaksi China terhadap kebijakan luar negeri baru Taiwan dimulai dari tahun 2016.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu menunjukkan rentang waktu terjadinya suatu peristiwa atau fenomena yang akan dianalisa. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan ketepatan waktu agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap perhitungan waktu kapan terjadinya sebuah peristiwa. Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Tahun 2016 dipilih karena Tsai Ing-wen terpilih menjadi Presiden setelah menang dalam pemilu dan pembentukan kebijakan luar negeri *New Southbound Policy* di Taiwan. Sedangkan, tahun 2018 dipilih karena China memberikan reaksi terhadap kebijakan luar negeri Taiwan pasca dibentuknya *New Southbound Policy*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: **“Bagaimana reaksi China terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri *New Southbound Policy* Taiwan?”**.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu terdapat tujuan yang berguna untuk menyajikan ilmu pengetahuan baru. Penulis berusaha untuk menyajikan analisa dari rangkaian fenomena internasional untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Dalam penelitian karya tulis ilmiah ini, penulis berusaha untuk meneliti reaksi China dalam menghadapi kebijakan luar negeri Taiwan: *New Southbound Policy* yang dibentuk pada tahun 2016.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menjelaskan permasalahan dalam suatu penulisan karya ilmiah. Kerangka dasar pemikiran dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam proses pengujian data dalam menganalisa suatu permasalahan untuk mendapat kesimpulan dan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Teori berfungsi menjelaskan maksud dari berbagai fenomena yang terjadi serta memberikan hipotesis secara sistematis (Nasution, 1998).

1.5.1 Konsep Politik Luar Negeri dalam Perspektif Realisme

Hubungan internasional adalah tempat antarnegara saling berinteraksi; negara adalah aktor utama dalam dunia internasional. Perilaku negara dalam interaksi hubungan internasional dijalankan secara rasional bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan *survival* dan keamanan nasional. Dalam meningkatkan kepentingan negara, menggunakan dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan (*power*); *power* adalah tujuan utama dan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri. Dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara, kapabilitas *power* sangatlah menentukan; negara bertindak dalam pertimbangan *power*, tindakan semacam itu “bersifat politik” (Dugis, 2016). Selanjutnya, politik terbagi menjadi dua fokus utama yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, bersifat individual tetapi ada interaksi ke luar sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Tidak hanya kepentingan internal, melainkan kepentingan eksternal juga.

Politik Luar Negeri (PLN) merupakan salah satu bidang kajian dalam studi Hubungan Internasional. Pengertian dari politik luar negeri yaitu pada dasarnya merupakan “*action theory*”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu pedoman nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional dalam dunia internasional. Jadi, politik luar negeri (*foreign policy*) berarti pedoman untuk melakukan tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara (Yanyan, 2016). Tidak hanya melibatkan aspek-aspek eksternal, melainkan juga aspek-aspek internal suatu negara menjadikan politik luar negeri merupakan studi yang kompleks.

Terdapat tiga poin penting dari PLN yaitu, pertama adalah sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Kedua, kebijakan yang bersifat reaktif/inisiatif terhadap negara lain. Dalam kerangka hubungan internasional, terdapat interaksi dan hubungan antar negara. Dalam interaksi antar negara, ada hubungan pengaruh dan respon satu dengan yang lain. Kebangkitan China menjadi landasan kuat untuk menunjukkan inisiatif yang konstruktif bagi kepentingan nasional. Ketiga, tujuannya yaitu untuk *survive* yang bersifat realis.

Realisme telah menjadi salah satu pendekatan teoritis utama untuk studi hubungan internasional. Pendukung utama realisme klasik yaitu Hans J. Morgenthau. Menurut realisme, Negara adalah aktor yang rasional. Suatu Negara akan terus memperluas dan mencari kekuasaannya. Morgenthau mengatakan tentang tanggung jawab pemimpin, artinya melihat pentingnya peranan individu dalam politik luar negeri (Hara, 2011).

Batas-batas yang tak terbatas atau (*limitless boundaries*) adalah perilaku PLN suatu negara, melalui tindakan-tindakan yang dilakukan, kata-kata yang digunakan untuk mempengaruhi negara lain dalam kebijakan luar negeri. Perilaku PLN bisa berupa konflik dan kerjasama, bisa perilaku yang tidak direncanakan oleh

pemerintah dan bisa juga tindakan yang tidak diambil oleh pemerintah. Setiap negara harus menolong dirinya sendiri atau *self-help* dengan memperkuat diri sehingga negara lain tidak berani menyerang.

Faktor utama proses perumusan strategi kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu: struktur sistem internasional, persepsi elit politik, strategi negara-negara lain, dan kapabilitas dalam negeri. Interaksi antara negara di bagi dalam empat strategi yang akan dijalankan oleh suatu negara, meliputi *leadership strategy* (negara kuat dan berpengaruh terhadap negara lemah), *concordance strategy* (negara lemah terhadap negara kuat), *accomodative strategy* (strategi mengalah), atau *confrontative strategy* (melawan secara terang-terangan). Kemudian strategi politik luar negeri ini yang menentukan tipe strategi yang akan dijalankan suatu negara. Selanjutnya, dapat dijelaskan dengan perkiraan pembuat kebijakan mengenai strategi negara lain dan perkiraan kemampuan mereka sendiri sebagai penentu gaya interaksi (Yani, 2006). Sesuai dengan keterangan (Gambar 1.1).



Gambar 1.1 Empat Strategi Kebijakan Luar Negeri(Sumber: diolah dari Yani, Yanyan M. 2006. PENGANTAR ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA)

Jika kedua negara berhadapan, setiap negara mempertimbangkan pilihan strategi yang akan dijalankan. Suatu negara harus mengukur kemampuan mereka sendiri dengan cara dibandingkan dengan negara yang dihadapi. Kemampuan yang diukur dapat dilihat dari kemampuan diplomasi, ekonomi hingga militer. Sangat penting untuk mengukur kemampuan sendiri karena selanjutnya kita dapat memperkirakan strategi apa yang akan dilakukan oleh negara yang dihadapi.

Keempat strategi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *Confrontative strategy* menjelaskan suatu negara A menghadapi negara B yang dianggap mengancam dan kedua negara sama kuatnya, sehingga disebut konfrontasi. Kemudian negara A tersebut memaksa negara B untuk mengakui kekuatan negara A sehingga memungkinkan terjadinya pertentangan secara terang-terangan. *Leadership strategy* menunjukkan posisi negara yang kuat membuat negara lain mendukung. Namun keadaan negara yang dihadapi belum diketahui lebih kuat atau lebih lemah sehingga terjadi keadaan memimpin. Dalam strategi ini, negara yang kuat menjadi pemimpin dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. *Concordance strategy* mengacu pada keadaan yang harmonis dan didasarkan pada persetujuan bersama. Suatu negara yang lemah mendapatkan dukungan dari negara lain dalam menghadapi suatu persoalan. Strategi ini jarang terjadi karena harus mempertimbangkan keadaan historis dan politik. *Accomodative strategy* menggambarkan suatu negara yang lemah dihadapkan pada suatu negara kuat, dimana kedua negara saling bertentangan kemudian terjadi akomodasi. Negara yang lebih lemah melakukan penyesuaian atau cara damai dalam menghadapi negara yang lebih kuat sehingga dapat menghindari konflik. Hal ini dilakukan karena suatu negara yang tidak cukup kuat dari segi politik dan militernya.

Kemungkinan yang terjadi terhadap kedua negara jika diukur dari penilaian terhadap kemampuan sendiri dan strategi negara yang dihadapi, penulis melihat *confrontative strategy* menjelaskan reaksi China terhadap kebijakan luar negeri Taiwan karena China secara terang-terangan mengancam kebijakan luar negeri *New Southbound Policy* yang dibentuk oleh Taiwan. China menilai kebijakan ini sebagai upaya bagi Taiwan untuk merdeka. China memaksa dan menegaskan Taiwan harus mematuhi dan menjalankan *One China Policy* yang telah disepakati bersama.

Sedangkan *leadership strategy* menjelaskan *Belt and Road Initiative* (BRI) adalah strategi ekonomi China yang melibatkan lebih dari 50 negara. BRI memungkinkan China untuk memimpin jalan bagi negara-negara tetangga karena China membentuk hubungan perdagangan baru dan membangun kekuatan untuk menarik minat masyarakat tetangga. Sehingga dengan adanya BRI, maka akan mengucilkan posisi Taiwan dalam komunitas internasional. Di lihat pula dari jumlah negara mitra NSP yang hanya melibatkan 18 negara.

Seperti dasar paradigma realisme pada umumnya, *state the only one actor and the most rational actor*. *State/negara* selalu memaksimalkan langkahnya demi menjamin *survive* baik secara ekonomi, politik, bahkan militer. Serta tanggung jawab pemimpin dilihat sebagai peranan individu yang penting dalam politik luar negeri.

Holsti (Dugis, 2008) digolongkan sebagai pengikut realisme klasik penerus Morgenthau, menjabarkan bahwa selain dipengaruhi oleh struktur sistem internasional, strategi umum PLN suatu negara juga dihubungkan dengan sifat dari keadaan domestik dan kebutuhan ekonomi. Menurut Holsti, ada empat komponen utama dalam PLN yaitu (1) orientasi-orientasi politik luar negeri, (2) peran-peran nasional, (3) tujuan-tujuan dan (4) tindakan-tindakan.

Komponen pertama yaitu orientasi-orientasi PLN. Dalam beberapa orientasi dasar PLN salah satunya disebut isolasi di mana untuk menjaga kepentingannya, negara memilih membatasi hubungannya dengan negara lain contohnya negara China. Komponen kedua dari PLN yaitu peran-peran nasional dan konsepsi tentang negara. Konsepsi peran nasional ini adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh para pembuat keputusan tentang komitmen, aturan dan tindakan yang sesuai untuk negara. Komponen ketiga yaitu tujuan-tujuan PLN yang terdiri dari tujuan jangka pendek yang harus dicapai; jika tidak, negara terancam. Kemudian ada tujuan jangka menengah yaitu kepentingan ekonomi dan perdagangan. Selanjutnya ada tujuan jangka panjang yang disebut sebagai visi dan rencana universal, seperti mengkomunikasikan dunia oleh rezim-rezim komunis atau tindakan sebagian negara Barat untuk membangun dunia yang demokratis.

Dalam analisis PLN Holsti, terdapat hubungan yang logis dimulai dari orientasi yang menentukan peran-peran nasional suatu negara, kemudian juga mempengaruhi pilihan tujuan-tujuan PLN yang akhirnya akan mempengaruhi tindakan-tindakan PLN yang akan diambil oleh suatu negara.

Berangkat dari konsep politik luar negeri dalam perspektif realisme yang telah dipaparkan di atas, menjelaskan keterkaitan teori tersebut dengan reaksi China terhadap pembentukan kebijakan luar negeri baru Taiwan. China merasa terganggu dengan terbentuknya *New Southbound Policy*. Dalam bidang politik, kepentingan *good influence* China akan terganggu dengan kehadiran *New Southbound Policy*. Taiwan sadar apabila negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu lebih dekat dengan AS dibandingkan China. Dalam bidang keamanan, China memperkuat militer di laut sehingga membuat Taiwan mendapat keuntungan jika kawasan Asia Tenggara berpikir bahwa China memperkuat militernya untuk mendominasi. Apabila militer China sudah kuat maka bisa membalikkan partai Koumintang atau KMT yang dinilai membangkang terhadap wilayah China.

China selalu memandang persoalan Taiwan dalam kerangka masalah domestik, yaitu penyatuan kembali salah satu provinsinya yang melepaskan diri pada tahun 1949. Perkembangan politik dalam negeri Taiwan cenderung ke arah pluralisme. Di bidang ekonomi, Taiwan juga berhasil menjalin lebih banyak hubungan dengan negara-negara Eropa Timur, Asia, serta Afrika, baik dengan pengakuan formal ataupun tidak. Kapabilitas China untuk mengisolasi Taiwan dalam sistem internasional semakin melemah. Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi China yang sangat pesat juga harus diimbangi dengan pertumbuhan kekuatan militernya sebagai antisipasi dari ancaman, baik ancaman yang datang dari luar (Academiaedu, 2015).

Presiden Xi Jinping bertekad menggagalkan segala upaya Taiwan untuk memerdekakan diri dari China dan menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip "Satu China". Isi pidato pembukaan kongres lima tahunan Partai Komunis China yaitu :

“Kami tidak akan mengizinkan siapa pun, organisasi atau partai politik mana pun, memisahkan wilayah dari China. Kami bertekad dan percaya bisa mengalahkan upaya separatistis apa pun yang ingin memerdekakan Taiwan.” (CNN Indonesia, 2017).

Perilaku negara China terhadap Taiwan yaitu menilai Taiwan sebagai salah satu isu sensitif di China. China semakin mewaspadaai Taiwan sejak Tsai Ing-wen terpilih sebagai Presiden Taiwan pada 2016. Tsai Ing-wen dari Partai Demokratik Berkelanjutan yang mendukung kemerdekaan Taiwan sepenuhnya dari China. Presiden China, Xi Jinping, meng/ingatkan agar Taiwan sebaiknya tidak berupaya memisahkan diri. Sebab, hukuman berat akan dikenakan terhadap segala bentuk upaya memisahkan diri.

1.6 Argumen Utama

Berangkat dari paparan konsep politik luar negeri menjelaskan perspektif dari kerangka teori mengenai reaksi China. Taiwan membuat China bereaksi yang ditujukan untuk mengurangi ambisi Taiwan dalam memerdekakan diri. China menegaskan jika kebijakan *One China Policy* atau Kebijakan Satu China tetap berlaku dan merupakan keputusan yang harus dijalankan bagi setiap wilayah di bawah kedaulatan China. Namun penerapan *One China Policy* oleh Taiwan terkesan kaku, tepatnya pada tahun 2016 Taiwan membentuk *New Southbound Policy* untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap China. Dalam implementasi *New Southbound Policy*, memancing reaksi China untuk membendung secara ekonomi, politik dan militer agar *New Southbound Policy* tidak menjadi “alat” untuk merdeka dari China.

1.7 Metode Penelitian

Kata ‘metode’ dan ‘metodologi’ memiliki pengertian yang berbeda. Metodologi merujuk pada alur pemikiran umum atau menyeluruh dan gagasan teoritis suatu penelitian, sedangkan metode merujuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti wawancara, observasi, dan survey. Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara

bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga akan diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu (Conny, 2010). Oleh karena itu, metodologi penelitian yang akan digunakan terbagi menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan yang berasal dari berbagai literatur dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan merupakan data yang tidak didapatkan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Data sekunder yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu diantaranya:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
- b. Ruang baca FISIP Universitas Jember
- c. Jurnal dan artikel ilmiah
- d. Media internet
- e. Buku

1.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang mana menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu peristiwa. Objek penelitian yang di peroleh, akan mendasari sebuah penelitian pada hipotesa-hipotesa yang telah disusun dalam penelitian. Dimana nantinya diakhiri dengan suatu kesimpulan yang umum.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam karya ilmiah ini akan dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi mengenai latar belakang munculnya permasalahan, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, argumen utama, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Dinamika Hubungan Negara China-Taiwan

Bab ini akan membahas mengenai sejarah hubungan luar negeri China terhadap Taiwan di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.

BAB III Kebijakan Luar Negeri Taiwan: *New Southbound Policy* (NSP)

Bab ini akan membahas mengenai terbentuknya *New Southbound Policy* serta perkembangan strategi Taiwan dalam menghadapi negara China.

BAB IV Reaksi China terhadap Kebijakan Luar Negeri Taiwan : *New Southbound Policy 2016*

Bab ini akan membahas mengenai reaksi atau strategi China terhadap kebijakan luar negeri Taiwan yaitu *New Southbound Policy* yang dibentuk oleh kepemimpinan Presiden Tsai Ing-wen.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian dari bab-bab sebelumnya.

BAB 2

DINAMIKA HUBUNGAN NEGARA CHINA-TAIWAN

2.1 Dinamika Hubungan Negara China-Taiwan tahun 1911-1949

Sebelum lebih jauh membahas mengenai reaksi China terhadap kebijakan luar negeri Taiwan, pada bab 2 ini penulis akan menguraikan dinamika hubungan Negara China-Taiwan dimulai dari tahun 1911-1949 yang menandai berpisahannya China-Taiwan secara diplomatik dan dikenal dengan istilah Hubungan Lintas Selat yang telah berlangsung hingga saat ini. Kemunculan Partai Komunis China yang berkuasa sampai sekarang membuat Taiwan yang diakui sebagai bagian dari China, mengalami hambatan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya.

2.1.1 Berdirinya Republik China tahun 1911

Dinasti Qing didirikan oleh bangsa Manchu yang berkuasa dari tahun 1644 sampai dengan tahun 1911. Akibat dari kegagalan dinasti Qing, kaum revolusioner berusaha untuk menggulingkannya. Kehancuran dinasti Qing disebabkan oleh penderitaan yang dialami oleh rakyat China seperti gagal panen, kekalahan pemerintah dalam perang dengan pihak asing serta bencana alam. Pemerintahan baru berbentuk republik segera diproklamasikan, ditandai dengan provinsi-provinsi di selatan melepaskan diri dari pemerintah pusat tahun 1911. Kemudian Sun Yat-sen dari kaum revolusioner menggalang bantuan dari pihak asing dan berhasil. Mengawali pembentukan Partai Nasionalis atau Kuomintang (KMT) oleh kaum revolusioner pada tahun 1912. Setelah 268 tahun kekaisaran Qing berkuasa di China, dinyatakan berakhir sesuai dengan dekrit yang tertulis. Kejadian ini disebut sebagai Revolusi Xinhai.

Untuk membentuk suatu pemerintahan republik, harus ada presiden dan ibukotanya. Tokoh revolusioner Sun Yat-sen kemudian dilantik sebagai presiden pertama dengan wakil presiden, Li Yuanhong. Secara resmi Republik China diproklamasikan. Tahun 1912 ditetapkan sebagai Tahun Republik pertama. Sun Yat-sen mengemukakan ide mengenai “Tiga Prinsip Rakyat” yaitu: pertama,

prinsip kebangsaan. Bangsa Tionghoa (suku Han) menjadi suku bangsa mayoritas di China dan dianggap sebagai “ras unggul”. Sun Yat-sen memandang penduduk China adalah bangsa yang satu, yaitu bangsa Tionghoa. Konsep kebangsaan yang satu ini menjadi kesatuan identitas nasional China dalam menghadapi imperialisme asing. Kedua, prinsip demokrasi. Melalui kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat, demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah harus dilakukan secara merata. Kekuasaan negara tidak dipusatkan pada satu tangan sebagai penguasa mutlak, untuk itu dibentuk pembagian kekuasaan yangimbang dan adil. Ketiga, prinsip kesejahteraan. Sun Yat-sen mendapat inspirasi dari Abraham Lincoln ketika membentuk prinsip ini. Abraham Lincoln menyatakan bahwa pemerintahan adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintah republik harus berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dari penjelasan di atas, Tiga Prinsip Rakyat menjadi falsafah negara yang dipertahankan sebagai ideologi oleh Republik China. Beijing ditetapkan sebagai ibukota Republik China. Pada tahun 1917, Sun Yat-sen di angkat sebagai pemimpin pemerintahan militer di selatan.

2.1.2 Kebangkitan Komunis (1927-1936)

Di awal abad ke-20, komunisme menawarkan kesetaraan kelas serta pemerataan hak milik menjadi paham yang sangat menarik. Karl Marx memandang bahwa ketidakseimbangan upah buruh dan petani dengan tingkat kesejahteraan yang didapat. Sedangkan, pemilik modal mendapatkan keuntungan yang besar dari upaya yang dilakukan oleh buruh dan petani. Negara harus memainkan perannya sebagai kendali atas aspek kehidupan masyarakat. Namun menimbulkan kebebasan dan hak asasi manusia yang terbatas juga atheisme sebagai salah satu syarat bagi anggota yang ingin bergabung.

China adalah negara yang berbatasan langsung dengan Rusia, mengakibatkan penyebaran ideologi komunis masuk dengan mudah. Pada tanggal 4 Mei tahun 1919, terjadi aksi massa besar-besaran melawan Jepang. Uni Soviet mendukung dan memberikan dukungan dana dan senjata. Gerakan 4 Mei menjadi salah satu peristiwa penting dalam pembentukan Partai Komunis China. Tokoh di balik komunis China yaitu Chen Duxiu, Li Dazhao, serta Lin Baoqu. Kemudian

mereka mendirikan Partai Komunis China pada tahun 1921. Dalam Kongres Komunis ke-3 dinyatakan bahwa anggota Partai Komunis diperbolehkan bergabung dengan KMT pada tahun 1923. Keputusan ini dikeluarkan akibat dari Sun Yat-sen membentuk aliansi dengan Uni Soviet. Masuknya anggota Partai Komunis dalam KMT, disebut sebagai Front Persatuan Nasionalis-Komunis. Pada tahun 1924, KMT dan Partai Komunis sepakat untuk mendirikan Akademi Militer Huangpu sebagai upaya untuk meningkatkan kekuatan militer China. Akibat tindakan Sun Yat-sen ini, Partai Komunis menilai Sun Yat-sen memihak terhadap Partai Komunis dan mendalami paham sosialisme.

Sun Yat-sen wafat pada tahun 1925 dan menjadi satu-satunya tokoh yang dihormati oleh pemerintah KMT maupun pemerintah komunis. Jasa besar Sun selama berkuasa, yaitu memperjuangkan demokrasi serta membentuk pemerintahan republik yang dikenal sebagai Bapak Negara. Setelah Sun Yat-sen wafat, kelompok komunis semakin gencar menyebarkan paham anti-barat dan anti-imperialisme. Wilayah kekuasaan di China dikerucutkan menjadi 2 tokoh yaitu, pemerintahan Chiang Kai-shek di Nanking serta pemerintahan Mao Zedong di Shaanxi.

Chiang Kai-shek menggantikan posisi Sun Yat-sen sebagai pemimpin KMT. Berbeda dengan Sun, Chiang Kai-shek memandang bahwa pemerintahan model Uni Soviet tidak cocok untuk diterapkan di China. Pada tahun 1927, aksi anti-komunis dan anti-Soviet terus meningkat di Beijing. Salah satu pendiri Partai Komunis, Li Dazhao dieksekusi mati karena dianggap berupaya untuk menggulingkan pemerintah. Kemudian di bawah arahan Chiang, aksi pembersihan terhadap orang komunis dimulai. Ada beberapa daftar nama yang terlibat, salah satunya yaitu Mao Zedong. Tujuan dari pembersihan ini yaitu untuk mempersatukan China dengan menghilangkan pihak-pihak yang menentang persatuan.

Pada tahun 1928, dalam Kongres Besar ke-5 ditetapkanlah kebijakan “Pemerintahan Terpimpin” dengan KMT sebagai inti pemerintahan. Tentara Merah (sebutan militer Partai Komunis) kemudian diperintahkan oleh Mao Zedong untuk mundur. Keadaan berbalik pada tahun 1930, terjadi perlawanan yang menentang pemerintahan Chiang Kai-shek. Namun terhenti karena adanya invasi Jepang.

2.1.3 Invasi Jepang (1936-1945)

Sebelumnya, pada tahun 1895 Jepang menduduki Taiwan karena sumber daya alam sekaligus pasar bagi barang industri Jepang. China menyerahkan Taiwan melalui Perjanjian Shimonoseki akibat kekalahan perang China antar kedua negara selama tahun 1894-1895. Hubungan China dan Jepang kemudian mengalami pasang surut seiring berjalannya waktu. Dengan kemajuan kekuatan militer menjadikan Jepang semakin kuat. Slogan orang Jepang yaitu “Asia untuk orang Asia”. Pengaruh Jepang salah satunya di wilayah timur laut China yaitu, Manchuria. Setelah tahun 1931, secara *defacto*, Manchuria dibawah yuridiksi China.

Tepatnya pada tahun 1932, Jepang melakukan serangan ke kota Shanghai. Pada saat itu Chiang dipercaya sebagai Ketua Komite Militer KMT menegaskan untuk melakukan konsolidasi internal sebelum melawan invasi asing. Maksudnya yaitu, Chiang berfokus untuk menghadapi orang komunis terlebih dahulu lalu melawan Jepang. Kurangnya perlawanan dari China, mengakibatkan kota Beijing dan Nanking jatuh di tangan Jepang pada tahun 1938. Jepang juga menyerang wilayah Amerika Serikat dengan menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor tahun 1941. Setelah pertemuan dengan perwakilan negara Inggris di Kairo, Chiang menandatangani Perjanjian Kairo pada tahun 1943. Isi perjanjiannya yaitu: Manchuria dan Taiwan akan dikembalikan kepada China setelah perang berakhir. Pada tahun 1945, dengan kekuatan militer Amerika Serikat kemudian menjatuhkan dua buah bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang mengalami kekalahan dan juga sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia II. Di tahun yang sama, Amerika Serikat, Inggris dan China mendeklarasikan “Deklarasi Potsdam”. Isi deklarasinya, yaitu menuntut Jepang untuk menyerah kepada sekutu dan mengembalikan pemerintahan kepada yang berhak.

2.1.4 Perang Sipil: Lahirnya RRC (1945-1949)

Lihat (Gambar 2.1)



Gambar 2.1 Peta Wilayah Geografis Taiwan (Sumber:diolah dari “Taiwan Larger Picture Maps”, diakses <https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/lcolor/twcolor.htm>, pada tanggal 25 Oktober 2018)

Perlawanan Partai Komunis terus meningkat dengan melakukan pembersihan bagi yang menentang Mao Zedong. Pada tahun 1942, Mao melakukan “Kampanye Pelurusan” yang menjadikan Mao sebagai pemimpin Partai Komunis. Pertahanan pemerintahan KMT selama ini didukung oleh Amerika Serikat sedangkan Uni Soviet sebagai pendukung Partai Komunis sehingga mengakibatkan perang yang sama kuatnya antara kedua belah kubu. Meskipun pemerintah Nasionalis dan Partai Komunis China telah menandatangani Kesepakatan Sepuluh Ganda pada tahun 1945 namun tidak berhasil menciptakan perdamaian.

Perang Sipil pun terjadi pada tahun 1946. Permulaan kebangkitan Tentara Pembebasan Rakyat atau *People's Liberation Army* (PLA) yang dibantu oleh Uni Soviet. Memasuki tahun 1947, keadaan Chiang mulai mengalami kesulitan akibat dari PLA merebut Manchuria utara. Namun pada tahun 1948, Chiang dilantik sebagai presiden pertama Republik China pasca perang dengan fokus kebijakan militernya yaitu menghancurkan Partai Komunis. Karena kegagalan Chiang yang terus berlanjut melawan perlawanan komunis, membuat Chiang mengajukan pengunduran dirinya sebagai presiden dan digantikan oleh Li Zongren.

Puncak dari perang sipil yang terjadi ditandai dengan kaburnya Chiang Kai-shek ke pulau Taiwan pada tahun 1949. Tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat China (RRC) dan diperingati sebagai Hari Nasional. Secara *de facto*², kekuasaan KMT masih dipimpin oleh Chiang Kai-shek meskipun telah mengundurkan diri. Sebelum Mao Zedong menguasai seluruh China, Chiang berencana untuk kabur ke pulau Taiwan. Pulau Taiwan memiliki luas 36 ribu kilometer persegi yang terletak 180 kilometer lepas pantai provinsi Fujian di China Tenggara. Taiwan disebut juga sebagai pulau Formosa artinya “pulau yang cantik”. Hingga saat ini Taiwan menjadi wilayah Republik China terakhir yang belum jatuh ketangan kepulauan China.

Pada tahun 1950, Chiang Kai-shek menjadi presiden Republik China hingga wafatnya tahun 1975. Dan kekuasaannya diteruskan oleh putranya, Chiang Ching-kuo sampai tahun 1988. Hingga saat ini, perselisihan antara China dan Taiwan belum menemukan titik terang. Perang Sipil yang memisahkan kedua wilayah ini berlanjut dan disebut sebagai Hubungan Antar Kedua Sisi Selat (Wicaksono, 2015).

² De facto adalah pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka. Negara terdiri dari wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat.

2.2 Dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan tahun 1949-1971

Tabel 2.1 *Timeline* Peristiwa Taiwan Pasca Berpisah dengan Kepulauan China

No.	Tahun	Peristiwa
1.	1949	Pemerintah ROC pindah ke Taiwan, diikuti 1,2 juta jiwa dari China.
2.	1952	Perjanjian Damai ditandatangani antara ROC dan Jepang.
3.	1954	Taiwan-Amerika Serikat menandatangani <i>Sino-American Mutual Defence Treaty</i> di Washington.
4	1958	China membombardir pulau-pulau lepas pantai yang dipegang oleh pasukan Nasionalis, hampir memicu perang antara China dan Amerika Serikat.
5.	1971	Taiwan kehilangan kursi PBB yang diadakan sejak 1946 sebagai Republik China, ke Republik Rakyat China.
6.	1979	Amerika Serikat memberlakukan <i>Taiwan Relations Act</i> (TRA)
7.	1987	Darurat militer, yang berlaku sejak 1949, berakhir dan larangan pembentukan partai politik baru dan publikasi berita dicabut.

(Sumber: diolah dari Ministry of Foreign Affairs Taiwan. 2018. *History Timeline*. Diakses melalui https://www.taiwan.gov.tw/content_3.php. Pada 25 Oktober 2018)

Setelah perang sipil tahun 1949, China dan Taiwan berpisah secara diplomatik. Berbagai pihak yang sebelumnya terlibat dalam perang, misalnya Amerika Serikat menyatakan tidak ingin terlibat lebih jauh dalam konflik ini. Sikap netralitas Amerika Serikat dinyatakan oleh Presiden Truman yang memimpin pada masa itu. Sikap agresif China untuk menarik kembali Taiwan menjadi satu kesatuan menimbulkan Krisis Pertama atau disebut dengan rencana Pembebasan Taiwan.

Melihat hal ini Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower mengajukan kebijakan untuk melindungi Taiwan dari serangan China. Kebijakan tersebut disebut sebagai “Resolusi Fomosa” dan telah disahkan oleh Senat Amerika Serikat pada tahun 1955. Sebelumnya pada tahun 1954, Taiwan-Amerika Serikat telah menandatangani *Sino-American Mutual Defence Treaty* di Washington.

Krisis Kedua terjadi pada tahun 1958, Amerika Serikat mengirim bantuan kepada Taiwan, dengan melengkapi pesawat F-86 milik Taiwan dengan rudal *sidewinder* yang dapat menghancurkan pesawat musuh secara langsung. Sejumlah pesawat MiG milik China berhasil dijatuhkan. Selain itu Amerika Serikat juga mengirim perlengkapan artileri berat ke wilayah Kinmen untuk menangkal tembakan dari China. Pada saat yang sama, Amerika Serikat sedang merencanakan serangan bom atom terhadap China.

Dengan bantuan dari Amerika Serikat, tidak hanya dalam bidang militer, namun juga dalam bidang ekonomi yang membuat pertumbuhan ekonomi Taiwan meningkat. Bantuan Amerika sekitar 30% investasi domestik di Taiwan dan memacu pertumbuhan ekonomi Taiwan sebanyak 9,6% per tahun selama tahun 1952-1961. Landasan perekonomian Taiwan yang berawal dari pertanian kini beralih pada industri yang menjadikan Taiwan sebagai salah satu dari empat “Macan Ekonomi Asia” di antaranya yaitu Singapura, Korea Selatan dan Hongkong. Selain industri berat, Taiwan juga mengembangkan teknologi elektronik dan digital hingga saat ini menjadi salah satu produsen alat-alat elektronik yang menjamin. Pada tahun 1980-an, ekonomi Taiwan menjadi lebih terbuka dan meningkatkan peluang perdagangan pasar yang semakin luas (Wicaksono, 2015).

China memberikan respon terkait penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan. Tetapi, apabila China memaksa reunifikasi dengan Taiwan akan memancing reaksi dari pihak Amerika Serikat. China semakin di uji dalam menjalankan dan melaksanakan pemerintahannya, jika China gagal mempertahankan Taiwan, maka akan memicu pemberontakan serupa di Tibet pada tahun 1950, Xinjiang pada tahun 1997 dan beberapa kawasan lainnya. Kondisi ini tidak akan merubah status quo, selama tidak ada kepentingan dua kekuatan besar (AS dan China) yang tereliminir: tidak ada deklarasi kemerdekaan oleh Taiwan (bagi China) dan tidak ada penggunaan serangan militer kepada Taiwan (bagi AS).

2.3 Era One China Policy tahun 1971-1985

2.3.1 Terbentuknya One China Policy

Lihat (Gambar 2.2)



Gambar 2.2 Peta Wilayah Geografis China (Sumber: diolah dari “China Larger Picture Maps”, diakses dari <https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/lgcolor/cncolor.html>, pada tanggal 25 Oktober 2018)

Kedudukan China dalam politik internasional semakin cemerlang. Terbukti dengan PBB mengesahkan Resolusi Dewan Keamanan nomor 2758 yang membatalkan Taiwan atas kursi keanggotaan tetap di Dewan Keamanan PBB dan digantikan pada pemerintah China pada tahun 1971.

Diplomasi antar kedua belah pihak pada tahun 1986 terjadi saat pemerintah Taiwan mulai mengizinkan warganya untuk mengunjungi kepulauan China serta adanya hubungan perdagangan langsung dan investasi dengan China. Di lain sisi dalam batas wilayah kepulauan China, China dengan Hongkong dan Macau menerapkan kebijakan “Satu Negara Dua Sistem” dan berniat untuk menawarkannya kepada Taiwan untuk membatasi upaya Taiwan dalam memerdekakan diri.

Politik luar negeri China yang mengutamakan politik domestik berdampak pada Taiwan yang selama ini dinilai sebagai suatu bagian dari China yang membangkang. Sikap Taiwan menentukan keberlanjutan kebijakan luar negeri China terhadap Taiwan. Taiwan diketahui memenuhi syarat sebagai negara, yaitu memiliki pemerintahan, rakyat, dan wilayah (Sujatmiko, 2012). Pentingnya pengakuan dari negara lain dalam mengakui kedaulatan suatu negara yang masih belum sepenuhnya dipenuhi oleh Taiwan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu organisasi internasional yang menaungi seluruh negara pun tidak mengakui Taiwan sebagai anggota tetap. Taiwan belum diakui sebagai negara yang berdaulat oleh sebagian negara lain di dunia menjadi kendala bagi Taiwan untuk menjalin hubungan diplomatik dan formal dengan negara lain. Taiwan menilai sulit untuk meningkatkan potensi dalam negerinya ke dalam dunia internasional merupakan dampak dari *One China Policy* atau Kebijakan Satu China yaitu, suatu kebijakan yang hanya mengakui adanya satu Negara China di dunia (Maulana, 2016).

One China Policy atau kebijakan satu China adalah pedoman utama bagi China bahwa Taiwan masih berada di bawah wilayah China dan negara lain harus menghormati dan mengakui kebijakan tersebut apabila tetap menjalin kerjasama dengan China. Sejak tahun 1989, isu soal Taiwan menjadi hal sensitif bagi China. Menurut China, kebijakan *One China Policy* antara Taiwan dan China daratan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan "Satu China". Meskipun berseteru, namun China-Taiwan masih berhubungan dengan baik. Tujuan utama dari China melalui *One China Policy* yaitu menyatukan kedaulatan bagian-bagian China yang terpisah. Tetapi seiring dengan pergantian kepemimpinan, maka terus mengalami perubahan dalam menjalankan kebijakan (BBC, 2017).

Di lain sisi, Taiwan memandang hubungan China-Taiwan merupakan hubungan antar negara bukan hubungan antara pemerintahan pusat dengan provinsinya. Dalam forum internasional yang dideklarasikan China, menyatakan bahwa pihak Taiwan harus tunduk pada kebijakan *One China Policy* karena Taiwan telah terikat pada konsensus tahun 1992 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak perwakilan yang dilaksanakan di Hongkong. Kebijakan *One China Policy* yang dikemukakan dari sudut pandang China yaitu artinya Taiwan merupakan bagian dari China dan tidak dapat lepas dari China. Reunifikasi damai "Satu Negara Dua Sistem" sebagai opsi untuk berdamai tidak dapat diwujudkan, maka ada opsi militer yang kemungkinan digunakan sebagai opsi terakhir untuk penyatuan kembali dua wilayah ini. China menjadi sorotan setelah berakhirnya Perang Dingin karena peningkatan perekonomian serta militer China semakin pesat.

Meningkatnya kapabilitas China secara tidak langsung berpengaruh terhadap Amerika Serikat. Upaya China ini dinilai untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat (Ross, 2004). Transisi kekuatan di abad 21, ditandai dengan meningkatnya kapabilitas China. Sebelumnya Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal dalam komunitas global. Amerika Serikat dan China tidak dapat terhindarkan terlibat dalam proses transisi kekuatan akibat dari perkembangan yang semakin meluas pada dunia internasional (Lai, 2011). Dalam memahami hubungan antara Amerika Serikat-China, permasalahan reunifikasi Taiwan menjadi salah satu kekuatan pendorong (*driving force*).

2.3.2 Hubungan Negara Amerika Serikat-Taiwan

Selama perjanjian komunike gabungan atau *Joint Communiqué*³ antara Amerika Serikat-China mulai pada tahun 1972, 1978, dan 1982 menekankan bahwa Amerika Serikat mengakui hanya ada Satu China dan Amerika Serikat tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Namun dalam prakteknya, Amerika Serikat semakin dekat dengan Taiwan ditandai dengan pembentukan TRA pada tahun 1979 memberikan dasar hukum bagi hubungan tidak resmi antara Amerika Serikat dan Taiwan, dan mengabadikan komitmen AS untuk membantu Taiwan dalam mengembangkan kemampuan pertahanannya.

Keterlibatan negara AS memicu ketegangan antara China-Taiwan, tahun 1979 terbentuk *Taiwan Relations Act* (TRA) isinya yaitu jaminan bagi hubungan perdagangan, pertukaran antar masyarakat, serta kelanjutan *transfer* senjata dan teknologi dari AS kepada Taiwan. Dengan adanya TRA, AS terus menjalin hubungan non-formal dengan Taiwan, seperti hubungan perdagangan, kebudayaan dan hubungan non-formal lainnya. Kapabilitas militer Amerika Serikat berada di atas militer China (Prasetya, 2005). China pun semakin agresif dalam menekan Taiwan. Perhatian politik luar negeri Taiwan menjadi fokus politik luar negeri China juga.

Melalui *Taiwan Relations Act* (TRA), AS menerapkan strategi *deterens* (pencegahan) untuk melawan perilaku sepihak *People's Liberation Army* (PLA atau angkatan bersenjata China) terhadap Taiwan. Ambisi China untuk merangkul kembali Taiwan terhambat oleh keterlibatan AS. AS menerapkan TRA untuk menangkal perilaku agresif China dalam upaya reunifikasi China dengan Taiwan. Sejak tahun 1954, *Sino-American Mutual Defense Treaty* dijalin antara AS dengan Taiwan. Kepentingan AS terbatas pada kepentingan reputasional. AS berupaya untuk mencegah China menyerang Taiwan dalam menjaga kredibilitasnya untuk keamanan regional.

³*Joint Communiqué* adalah sebuah perundingan yang dilangsungkan oleh kesepakatan antar negara. Dalam penelitian ini, perjanjian antara Amerika Serikat dan China disebut dengan Shanghai Communiqué.

Perjanjian *Taiwan Relations Act* (TRA) dibentuk pada 10 April 1979. Melalui TRA, AS dapat menjalin hubungan perdagangan, kebudayaan dan berbagai hubungan non-formal. Dalam TRA, AS menjalankan beberapa kebijakan, yaitu: (1) Memelihara dan mengembangkan hubungan kultural, perdagangan dan lain sebagainya secara terjangkau dan bersahabat di antara AS dan rakyat Taiwan, (2) Mendeklarasikan perdamaian dan stabilitas di wilayah kepentingan politik, keamanan dan ekonomi AS dan di wilayah yang menjadi perhatian internasional, (3) Memperjelas masa depan Taiwan akan ditentukan oleh cara-cara damai; menganggap bahwa usaha-usaha yang menentukan masa depan Taiwan, selain cara-cara damai, termasuk boikot atau embargo, merupakan ancaman keamanan dan perdamaian bagi negara-negara Pasifik Barat dan menjadi perhatian penting bagi AS, (4) Menyediakan persenjataan *defensive* untuk Taiwan, (5) Meyakinkan hak untuk melawan segala macam bentuk serangan yang akan mengancam keamanan atau sistem ekonomi dan sosial rakyat Taiwan. AS berhak menjual persenjataan kepada Taiwan dengan tujuan sebagai pertahanan diri, sesuai kebutuhan (Dumbaugh, 1998).

Isi "*Six Assurances*"⁴ (1982) Presiden Reagan ke Taiwan: pertama, belum menyetujui untuk menetapkan tanggal untuk mengakhiri penjualan senjata ke Taiwan; kedua, belum setuju untuk mengadakan konsultasi dengan RRC mengenai penjualan senjata ke Taiwan; ketiga, tidak akan memainkan peran mediasi apa pun antara Taipei dan Beijing; keempat, belum setuju untuk merevisi UU TRA; kelima, belum mengubah posisinya mengenai kedaulatan atas Taiwan; keenam, tidak akan memberikan tekanan pada Taiwan untuk bernegosiasi dengan RRC (crsreport, 2001).

Pandangan Taiwan mengenai Arti "Satu China" pada tahun 1992. Kedua sisi Selat Taiwan setuju bahwa hanya ada satu China. Namun, kedua sisi Selat memiliki pendapat berbeda tentang makna "satu China". Untuk China, "satu China" berarti "Republik Rakyat China (RRC)," dengan Taiwan untuk menjadi "Wilayah Pemerintahan Khusus" setelah penyatuan. Sedangkan di lain sisi, Taiwan

⁴ *Six Assurances* adalah sebuah perjanjian yang berisi enam jaminan Amerika Serikat terhadap Taiwan.

menganggap "satu China" berarti Republik China (ROC), yang didirikan pada 1911 dan dengan kedaulatan *de jure*⁵ atas seluruh China. Namun, ROC saat ini hanya memiliki yurisdiksi atas Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Matsu. Taiwan adalah bagian dari China, dan kepulauan China adalah bagian dari China juga.

Pada tahun 1992, hubungan Amerika Serikat-China mengalami masalah. Dalam masa pemerintahan Presiden George H. W. Bush, Amerika Serikat menjual 150 buah pesawat F-16 kepada Taiwan dan merupakan nilai penjualan senjata ke Taiwan dengan posisi terbesar (Lai, 2010). Terjadi ketegangan di selat Taiwan pada tahun 1996. Ketegangan tersebut dipicu oleh latihan militer disertai uji coba rudal yang ditekankan oleh China sebagai tanda provokasi dalam pemilu presiden pertama di Taiwan.

Penjualan senjata ke Taiwan dilanjutkan oleh pemerintahan Obama dengan melakukan transfer persenjataan sebesar 6,4 milyar dollar AS. Penjualan tersebut terdiri dari 114 misil Patriot sebesar 2,81 milyar dollar, 60 helikopter Black Hawk senilai 3,1 milyar dollar dan selebihnya peralatan komunikasi untuk pesawat F-16 yang dipesan oleh Taiwan sebesar 340 juta dollar (BBC, 2010).

Ketegangan antara Taiwan-China sempat mereda setelah Ma Ying-jeou dari partai Kuomintang yang bersikap pro-China terpilih sebagai presiden Taiwan pada tahun 2008. Namun dalam pemilu berikutnya pada tahun 2016, yang dimenangkan oleh Tsai Ing-wen dari partai DPP menolak secara terbuka dan secara eksplisit untuk mengakui Partai Komunis dan Konsensus KMT mengenai prinsip "Satu China" (SCMP, 2016).

Amerika Serikat dan Taiwan menjalankan hubungan tidak resmi yang kuat. Dalam *Joint Communique*, Amerika Serikat mengakui Pemerintah Republik Rakyat China sebagai satu-satunya pemerintah resmi China, serta mengakui bahwa hanya ada satu China dan Taiwan merupakan bagian dari China. Amerika Serikat akan mempertahankan hubungan budaya dan perdagangan tidak resmi, serta lainnya dengan rakyat Taiwan. *The American Institute in Taiwan* (AIT)

⁵ *De jure* adalah bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh Negara lain dengan berdasarkan pada kaidah kaidah yang diatur dalam hukum internasional.

bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan AS terhadap Taiwan. Hubungan *People-to-People* antara Amerika Serikat dan Taiwan terus meningkat. Perjalanan untuk bisnis dan hiburan dari Taiwan ke Amerika Serikat telah meningkat 50 persen sejak Taiwan menjadi anggota Program Pelepasan Visa AS pada tahun 2012. Taiwan adalah sumber pelajar internasional terbesar ketujuh di Amerika Serikat. Amerika Serikat juga memberikan bantuan kesempatan belajar ke Taiwan untuk pelajar AS.

Amerika Serikat mendukung partisipasi Taiwan di organisasi internasional yang tidak memerlukan status negara bagian sebagai syarat keanggotaan. Taiwan dan Amerika Serikat termasuk dalam sejumlah organisasi internasional yang sama, termasuk *World Trade Organization (WTO)*, *the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, and *the Asian Development Bank (ADB)*. Pada Juni 2015, AIT dan *Taipei Economic and Cultural Representative Office (TECRO)* membentuk *Global Cooperation and Training Framework*, sebuah kesempatan untuk memperluas kerjasama AS-Taiwan pada isu-isu global dan regional seperti kesehatan masyarakat, pembangunan ekonomi, energi, hak-hak perempuan, dan bantuan terhadap bencana (U.S. State Department, 2018).

Taiwan membutuhkan bantuan Amerika agar dapat mengintegrasikan demokrasi Taiwan dalam organisasi internasional. Saat ini, kurangnya "status kenegaraan" resmi membatasi Taiwan, tetapi ada banyak kasus di mana status negara bukanlah persyaratan. Akhirnya, Taiwan dibentuk ke dalam sistem komando, kontrol, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan serta pengintaian di wilayah tersebut. Taiwan dijadikan markas bagi salah satu fasilitas radar terpenting sehubungan dengan penetrasi mendalam ke kepulauan China (The national interest, 2016). Amerika sepenuhnya melakukan komitmen terhadap Taiwan yang merupakan pedoman penting demokrasi bagi strategi pertahanan AS di kawasan Asia.

2.3.3 Hubungan Negara Amerika Serikat-China

Selama ini Amerika Serikat yang ikut terlibat atas politik Asia menimbulkan pergolakan dalam peran China di wilayah Asia. Amerika Serikat terlibat dalam

perang sipil yang mendukung Partai Nasionalis tahun 1949. Keterlibatan Amerika Serikat bukan hanya konflik China dengan Taiwan saja, ada juga intervensi saat Perang Korea tahun 1954, lalu perang Indocina (Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja) atau Perang Vietnam tahun 1976 yang sangat dekat dengan perbatasan China (Frankel, 1991). China dapat menahan kekuatan militer Amerika Serikat dalam perang yang memakan banyak korban jiwa itu. Setelah China memproklamkan RRC dan berdiri sebagai negara, China semakin giat untuk memperluas wilayah kekuasaannya terhadap wilayah-wilayah perbatasan. China berambisi menjadikan dirinya sebagai negara besar.

Presiden Amerika Serikat Richard Nixon melakukan perjalanan ke China pada tahun 1972. Dalam pertemuan antara Nixon dan Mao Zedong, menegosiasikan *Shanghai Communique* yang menyatakan: “*The United States acknowledges that Chinese on either side of the Taiwan Strait maintain there is but one China and that Taiwan is a part of China. The United States does not challenge that position*”. Amerika Serikat memahami *One China Policy* dan mengklaim Taiwan adalah bagian dari China. Langkah ini menjadi permulaan peningkatan hubungan antara Amerika Serikat-China untuk menciptakan relasi yang lebih baik lagi. Pada tahun 1978, menandai Perjanjian Komunike kedua antara Amerika Serikat dan China dalam mencapai kesepakatan mengenai *One China Policy*. Dalam perjanjian ini menyatakan bahwa Amerika Serikat memutuskan hubungan dengan Taiwan. Kemudian pada pemerintahan Reagan, menandatangani komunike gabungan ketiga dengan Republik Rakyat China untuk menstabilkan hubungan antar kedua negara pada tahun 1982.

Namun tidak lama setelah itu, Amerika Serikat mendukung Taiwan dalam upaya mendorong demokrasi dengan mengeluarkan *Six Assurances* ke Taiwan. Nampaknya Amerika Serikat mengakui *One China Policy* di PBB tetapi juga masih berhubungan dengan Taiwan. Di atas kertas seolah-olah Amerika Serikat menjalankan *One China Policy* namun di dalam prakteknya tidak. Amerika Serikat merubah hubungan kerjasama China-Taiwan adalah dengan Kuomintang (KMT). Bukan dengan Negara, namun dengan “sebuah bagian dengan negara” yaitu KMT.

Peran AS melanggengkan hubungan AS di Asia Timur supaya AS memiliki kawan di Asia Timur.

2.4 Era Ekonomi China

China dan Taiwan sempat bersatu selama empat tahun (1945-1949), tetapi Revolusi Komunis mengakibatkan disintegrasi terjadi. Adanya intervensi Amerika Serikat sejak tahun 1950 dengan memberikan bantuan kepada pemerintahan Nasionalis di Taiwan. Perkembangan ekonomi Taiwan yang pesat dan tumbuh menjadi negara yang semakin demokratis. China justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dengan tetap bertahan pada sistem komunis China. Kemajuan ekonomi Taiwan yang pesat sebagai alat penawar bagi negara-negara lain untuk mengalihkan pengakuannya dari China ke Taiwan (Mubah, 2014).

Setelah terbentuknya Republik Rakyat China pada tahun 1949, dibandingkan Uni Soviet dan Amerika Serikat, Mao Zedong berupaya untuk memperkuat ekonomi China serta melakukan transformasi kebijakannya yang disebut “Lompatan Jauh ke Depan”. Kebijakan ini berisi peningkatan produksi terhadap pertanian dan industri baja untuk di ekspor ke luar negeri.

Pada tahun 1966-1976, Mao Zedong memperkenalkan Revolusi Kebudayaan. Revolusi Kebudayaan terdapat 4 hal, yaitu: kebudayaan, gagasan pemikiran, tradisi kuno, serta Tentara Merah berhak untuk menghancurkan segala hal yang berhubungan dengan budaya Barat atau feodalisme (Harmini, 2004). Dalam penerapannya, revolusi kebudayaan sebagai bentuk perlawanan Mao terhadap kaum intelektual dan kaum borjuis yang semakin meluas di China.

Meskipun diterapkannya Revolusi Kebudayaan, tidak membawa perubahan pada perekonomian China. Kegagalan ekonomi China di masa Mao Zedong yang mengakibatkan kelaparan massal dan stagnasi ekonomi. Pemerintah China kemudian berupaya untuk memperbaiki ekonomi China dengan mengubah orientasi ekonominya. Pada tahun 1978, sejak reformasi ekonomi di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, orientasi ekonomi China mulai terbuka dan mengarah pada kapitalisme. Ada empat sektor utama sebagai implementasi kebijakan modernisasi

yaitu, antara lain pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertahanan (Dara, 2018).

Akibat dari modernisasi ekonomi China, menarik investor Taiwan terhadap pasar di China. Tepatnya pada tahun 1980-an, kegiatan investasi Taiwan ke China meningkat secara signifikan setiap tahun. Potensi ekonomi China yang menawarkan *low cost labor*, mendorong hubungan ekspor impor antara China-Taiwan serta pendekatan kultural menjadi salah satu faktor yang menarik pengusaha Taiwan berinvestasi di China (Chen, 2003).

Di balik pebisnis Taiwan atau dikenal sebagai *Taishang* memiliki peran yang penting terhadap hubungan lintas selat. Peran *Taishang* dibagi menjadi empat peran yang berbeda tergantung dari lokasi atau basis operasi mereka di negara China atau Taiwan.

Pertama, *Taishang* sebagai sandera China. Jika China mengancam untuk memutus hubungan ekonomi lintas selat, maka akan membahayakan kepentingan bisnis dan aset milik *Taishang*. Kepentingan ekonomi *Taishang* akan ditahan atau diberikan sanksi oleh China dan menghambat kinerja *Taishang*. China kemudian dapat memanfaatkan para *Taishang* tersebut untuk memaksa pemerintah Taiwan agar sejalan dengan pemerintah China karena China memiliki insentif untuk memaksakan atau mengancam untuk memaksakan sanksi ekonomi terhadap Taiwan. Kedua, *Taishang* sebagai agen China. Untuk mengatasi tekanan dari China dan untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka, *Taishang* secara aktif mendukung dan mempromosikan kebijakan Taiwan di China, sehingga bertindak sebagai agen Beijing. Namun selama bertahun-tahun kurangnya struktur yang formal menghambat *Taishang* dalam bertindak. Ketiga, *Taishang* sebagai kekuatan penyangga Taiwan. Jika *Taishang* diakui oleh China untuk pertumbuhan ekonomi ekspor China, maka *Taishang* dapat menjadi kekuatan politik bagi Taiwan, sehingga membantu pemerintah Taiwan. Keempat, *Taishang* sebagai negosiator untuk Taiwan. Jika *Taishang* dapat secara efektif menggunakan kelembagaan mereka sendiri—terutama *Taiwanese Business Associations* (TBA) untuk memengaruhi pemerintah China, sehingga *Taishang* menjadi negosiator bagi Taiwan. TBA mewakili kelompok besar pebisnis yang dibutuhkan oleh China.

China dapat menekan pasar domestik, misalnya, dalam *real estate* dan konstruksi, dan inflasi yang tinggi. Para pekerja migran China dengan jumlah besar yang bekerja di Taiwan dapat menggantikan pekerja Taiwan dari pekerjaan mereka dan mengakibatkan masyarakat Taiwan mengalami gangguan sosial dan ekonomi. Namun, tidak hanya pertimbangan ekonomi saja, adanya kekhawatiran dalam hubungan integrasi lintas selat dapat membahayakan posisi Taiwan dan mendorong serangan militer China di Selat Taiwan. Semakin banyak modal Taiwan diinvestasikan di China, semakin besar pula bagi Taiwan menjadi bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi China dan juga semakin mudah bagi pebisnis Taiwan melakukan kerjasama dengan China yang saling menguntungkan (Schubert, 2010).

Amerika Serikat memiliki kerjasama dengan China di bidang ekonomi, meskipun dalam hubungan pertahanan dan politik masih tidak sejalan. Namun pada tahun 1985, China mulai terbuka terhadap investasi asing terutama dengan AS. Salah satu konflik ekonomi global yang sangat diperebutkan adalah peningkatan ekspor China yang mengejutkan di pasar dunia. Dengan adanya kejadian ini, banyak negara industri yang menuduh China secara tidak adil mendukung daya saingnya dengan menurunkan nilai mata uang China untuk menjaga harga impor yang rendah. Secara khusus, Amerika Serikat memandang dirinya sebagai korban utama kebijakan perdagangan China. Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan barang dengan China sejak 1984.

Tabel 2.2 *Timeline* Peristiwa Era Ekonomi China

No.	Tahun	Peristiwa
1.	2010	China Menjadi Ekonomi Terbesar Kedua di Dunia
2.	2011	Poros AS Menuju Asia Peningkatan investasi — diplomatik, ekonomi, strategis, dan sebaliknya — di kawasan Asia-Pasifik dipandang sebagai langkah untuk

		melawan pengaruh China yang semakin meningkat.
3.	Februari, 2012	Meningkatnya Ketegangan Perdagangan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang mengajukan "permintaan konsultasi" dengan China dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai pembatasan ekspor logam.
4.	November, 2012	Presiden Baru China Kongres Nasional Partai ke-18 diakhiri dengan Xi Jinping menggantikan Hu Jintao sebagai presiden, sekretaris jenderal Partai Komunis, dan ketua Komisi Militer Pusat.
5.	April, 2017	Kunjungan Xi Jinping ke Amerika Serikat Presiden Donald J. Trump menyambut Xi Jinping untuk membahas perdagangan bilateral dan Korea Utara menjadi agenda utama.
6.	Maret, 2018	Tarif Trump menjadikan China sebagai Target -Pemerintahan Trump mengumumkan tarif terhadap impor China, senilai sekitar \$50 milyar.
7.	Juli, 2018	Meningkatnya Perang Dagang AS-China -Pemerintahan Trump membebankan tarif sebesar \$34 milyar terhadap produk China. -China membalas dengan memberikan tarif terhadap lebih dari lima ratus produk AS. Penolakan itu, juga bernilai sekitar \$34 milyar, pada komoditas seperti daging sapi, susu, makanan laut, dan kacang kedelai. Masalah tarif antara AS-China dapat memicu ketidakstabilan dalam pasar global.

(Sumber: diolah dari Council on Foreign Relations. 2018. *U.S. Relations With China 1949 – 2018*. Diakses melalui <https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china>. Pada 25 Oktober 2018)

Dilansir dari BBC, terdapat beberapa strategi China untuk melawan perang dagang. Pertama, menyerang perusahaan AS yang berada di China. China dapat menghambat perusahaan-perusahaan AS dengan memperlambat izin bea cukai untuk impor AS, menunda atau menolak aplikasi visa. Kedua, pembatasan pariwisata ke AS. Lebih dari 130 juta orang melakukan perjalanan keluar dari China pada tahun 2016. Ketiga, melakukan devaluasi mata uang. Menurunkan nilai mata uang yuan akan membantu ekspor dengan membuat barang-barang China lebih murah bagi negara lain untuk diimpor, dan dapat mengimbangi kenaikan harga yang disebabkan oleh tarif AS. Keempat, China berfokus pada pertumbuhan domestik. China akan mencoba memperluas perdagangan dengan negara-negara selain AS. China telah mencoba untuk menjauh dari AS dan menuju pada penguatan ekonomi secara mandiri dan kuat (BBC, 2018).

BAB 3

KEBIJAKAN LUAR NEGERI TAIWAN:

NEW SOUTHBOUND POLICY (NSP)

Dalam bab tiga ini akan menguraikan Kebijakan Luar Negeri Taiwan: *New Southbound Policy* terlebih dahulu untuk memahami pokok permasalahan dalam skripsi ini. Pada bab ini terbagi menjadi empat sub bab yaitu asal mula terbentuknya *New Southbound Policy*, pengertian, tujuan serta prinsip-prinsip dari kebijakan *New Southbound Policy*.

3.1 *New Southbound Policy*

Republic of China (ROC) atau Taiwan, terletak di Pasifik Barat antara Jepang dan Filipina. Luas total Taiwan beserta pulau-pulau terencilnya adalah 36.197 kilometer persegi. Jumlah penduduk Taiwan sekitar 23 juta jiwa (Ministry of Foreign Affairs Republic of China, 2017). Taiwan berjarak 180 kilometer dari pantai sebelah timur China. Taiwan merupakan salah satu tantangan dan isu sensitif yang tengah dihadapi oleh China. Taiwan yang berada di Kawasan Pasifik Barat, dianggap sebagai pembangkang oleh China lantaran selama beberapa tahun terakhir semakin agresif untuk merdeka.

Sistem ekonomi Taiwan berbentuk kapitalis dengan mata uang *Taiwan Dollar* (TWD). Namun, Taiwan bukanlah negara yang merdeka seutuhnya atau negara dengan pengakuan terbatas. Secara *de jure*, hanya sekitar 23 negara yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat. Padahal secara *de facto*, Taiwan memenuhi syarat sebagai negara. Meskipun bukan negara berdaulat, namun Taiwan memiliki paspor sendiri. Perkembangan sistem politik Taiwan mengalami perubahan ke arah pluralisme dan *flexible diplomacy* yang saat itu dikeluarkan oleh Presiden pertama Taiwan yaitu, Lee Teng Hui tahun 1994. Dari tahun ke tahun, *Democratic Progressive Party* (DPP) mengalami peningkatan menandakan Taiwan berdiri secara bebas dan demokratis.

Keinginan untuk mendekati diri ke negara-negara Asia Tenggara bukanlah hal baru bagi Taiwan. Namun China memandang NSP hanya sebagai kelanjutan dari inisiatif sebelumnya. *New Southbound Policy* bukan pertama kali yang menargetkan negara-negara NSP seperti kepemimpinan Tsai Ing-wen. NSP dibangun berdasarkan upaya sebelumnya, yang ditujukan terutama untuk mengarahkan kembali investasi luar negeri Taiwan ke Asia Tenggara, oleh Presiden Lee Teng-hui dan Chen Shui-bian. Sekitar tahun 1990an, Taiwan melihat kurangnya negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, Lee Teng Hui sebagai presiden ketiga Taiwan yang terpilih pada tahun 1988 melihat potensi kekuatan ekonomi untuk memenuhi tujuan politik. Asia Tenggara menjadi tujuan kebijakan Taiwan yang disebut *Go South Policy* (Bing, 2017).

Pemerintahan Presiden Lee Teng-Hui pada tahun 1994-1996 memprakasai suatu kebijakan luar negeri Taiwan yang disebut kebijakan *Go South*. Kebijakan *Go South* Presiden Lee Teng-hui dimulai pada tahun 1994 dan berupaya mengurangi ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap China dengan meningkatkan ekspansi komersial ke Asia Tenggara. Rencana tersebut bertumpu pada strategi untuk meningkatkan investasi baik dari perusahaan yang berhubungan dengan KMT dan perusahaan milik negara di Asia Tenggara, sementara secara bersamaan meningkatkan aliran bantuan asing ke negara-negara sasaran. Selain itu, Lee membatasi teknologi tinggi dan investasi infrastruktur melintasi Selat, dan melarang investasi individu dari perusahaan tertentu ke China melebihi \$50 juta (Nytimes, 2001).

Sebagian karena kebijakan Lee, investasi asing langsung Taiwan (FDI) ke negara-negara ASEAN awalnya tumbuh dari \$1,17 miliar pada tahun 1993 menjadi \$4,98 miliar pada tahun 1994. Selama periode yang sama, investasi Taiwan ke China turun dari \$3,17 miliar menjadi \$962 juta. Meskipun demikian, tren ini stabil selama beberapa tahun ke depan. Pada Desember 1996, Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan secara tiba-tiba mengumumkan pembekuan investasi luar negeri oleh perusahaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri (Glaser, 2018).

Selanjutnya kebijakan *Go South* Kedua pada tahun 1997-1999 selama krisis keuangan Asia tahun 1997, yang melumpuhkan sebagian besar Asia Tenggara tetapi berdampak terbatas pada Taiwan karena cadangan devisa yang cukup banyak dan utang luar negeri yang rendah (Washingtonpost, 1998).

Secara umum, Lee memandang krisis itu sebagai sebuah peluang bagi Taiwan, dan dia tetap teguh bahwa meskipun gejolak pasar yang sedang berlangsung, investasi ke Asia Tenggara akan menguntungkan Taiwan. Sebagian dari dorongan ini didorong oleh keinginan untuk memperkuat hubungan Taiwan-ASEAN dengan memanfaatkan cadangan devisa Taiwan untuk membantu negara-negara ini. Pemerintah Lee mendistribusikan dana ke bank-bank milik Taiwan di negara-negara Asia Tenggara dan menciptakan perusahaan induk yang disebut *Southeast Asia Investment Company* (Glaser, 2018).

Kementerian Urusan Ekonomi mencatat bahwa infrastruktur yang kurang berkembang dan kebijakan ekonomi yang sangat teregulasi dari beberapa negara Asia Tenggara menghambat aliran investasi dari Taiwan. Investasi FDI Taiwan ke negara-negara ASEAN menurun dari \$4,85 miliar pada tahun 1997 menjadi \$1,42 miliar pada tahun 1998 (Glaser, 2018). Kemudian bantuan China terhadap negara-negara yang mengalami krisis menjadi kesempatan bagi China dalam memperkuat ikatan ekonomi dan politik di wilayah tersebut.

Selanjutnya Presiden Chen Shui-bian membawa perubahan pada strategi kebijakan *Go South* pada tahun 2002-2008 yaitu kebijakan *Go South* setelah Taiwan diterima oleh *World Trade Organization* pada tahun 2002. Mirip dengan pendahulunya, Chen berusaha untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Taiwan di China dan memperluas pengaruh ekonomi Taiwan di Asia Tenggara. Chen berfokus pada penguatan sistem dukungan investasi untuk bisnis Taiwan yang beroperasi di Asia Tenggara. Untuk mendiversifikasi investasi Taiwan, kebijakan tersebut juga membentuk mekanisme penilaian, memfasilitasi investasi industri, dan memberikan pelatihan bagi tenaga kerja. Pada akhirnya, daya tarik ekonomi China terbukti terlalu kuat bagi bisnis Taiwan, sehingga menghambat efektivitas kebijakan *Go South* (Chinadaily, 2004).

Meskipun investasi Taiwan ke ASEAN tumbuh secara berkelanjutan pada pertengahan tahun 2000-an dan memuncak pada \$10,2 miliar pada 2008, namun menurun menjadi \$1,9 miliar pada 2009 (Ministry of Economic Affairs ROC, 2012). Sementara beberapa dari penurunan ini dapat dikaitkan dengan daya saing ekonomi Asia Tenggara yang tertinggal, berbagai faktor geopolitik, dan krisis keuangan global, kebijakan Chen sendiri juga membuka jalan bagi bisnis dari Taiwan untuk mencari peluang di China. Pada tahun 2001, pemerintahan Chen mengadopsi kebijakan “liberalisasi proaktif dengan manajemen yang efektif” yang dirancang untuk mempromosikan pertukaran ekonomi di seluruh Selat. Kebijakan ini mengurangi pembatasan yang dibuat oleh Lee pada industri teknologi tinggi dan menghapus investasi ke China senilai \$50 juta. Chen juga mengizinkan bank-bank Taiwan untuk mendirikan kantor-kantor perwakilan di China dan memungkinkan modal dari China mengalir ke pasar Taiwan. Akibatnya strategi ini berlawanan dengan tujuan dibentuknya kebijakan *Go South*.

Implementasi *Go South Policy* dimulai pada tahun 1994 selama kepemimpinan mantan presiden Lee Teng Hui. Manfaat dari *Go South Policy* yaitu sebagai sebuah inisiatif untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama Taiwan dengan negara-negara ASEAN. Taiwan melihat bahwa kawasan Asia Tenggara memiliki rencana pembangunan nasional jangka menengah (10 tahun) serta jangka panjang (20 tahun) serta mengembangkan kekuatan industri dan keterampilan SDM. Langkah ini diambil oleh Taiwan sebagai upaya Taiwan untuk mengimbangi kekuatan ekonomi China.

Pada tahun 2016, Tsai Ing-wen memenangkan pemilu Presiden Taiwan. Dengan terpilihnya Tsai Ing-wen mengawali Taiwan memiliki presiden wanita pertama sejak terbentuknya negara Taiwan tahun 1949. Tsai Ing-wen diusung oleh partai yang dipimpinnya yaitu *Democratic Progressive Party* (DPP). Salah satu kebijakan baru yang diusung oleh Presiden Tsai Ing-wen yaitu *New Southbound Policy* atau kebijakan selatan baru (NSP) untuk mengembangkan kerjasama yang luas dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Terdapat indikasi terjadi perubahan karena perbedaan strategi yang ditawarkan oleh Presiden Taiwan yang baru. Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi ketergantungan Taiwan pada China dan untuk meningkatkan kerjasama Taiwan dengan negara-negara lain. Kebijakan ini diresmikan pada 5 September 2016. Ada 18 negara yang menjadi sasaran kebijakan. 10 negara diantaranya anggota ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Brunei. 8 negara Asia Selatan adalah India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Butan, Nepal, Australia dan New Zealand. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Taiwan untuk menunjukkan eksistensi Taiwan yang mana perannya lebih aktif dengan negara tetangga sekitarnya.

Lembaga Eksekutif Republik Taiwan menyetujui rencana kerja Kebijakan Selatan Baru, yang akan merancang peran Taiwan dalam pembangunan Asia, mencari arah dan momentum baru untuk tahap baru pembangunan ekonomi negara Taiwan. Menurut Perundingan Perdagangan Kantor Eksekutif Yuan, rencana kerja promosi dirumuskan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Rencana kerja Kebijakan Selatan Baru pada awalnya akan fokus pada empat bidang berikut: (New Southbound Policy, 2016). Pertama, kerjasama ekonomi dan perdagangan: Memperkuat kerjasama industri dan ekspansi ekonomi dan perdagangan; memfasilitasi kerjasama dalam proyek pembangunan infrastruktur; mempromosikan ekspor layanan integrasi sistem dan bantuan keuangan. Kedua, pertukaran bakat: Memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang saling melengkapi antara Taiwan dan negara-negara NSP dengan bekerja sama untuk mengembangkan bakat sumber daya manusia di bawah prinsip “pertukaran yang berpusat pada manusia, bilateral, dan beragam”. Ketiga, pembagian sumber daya: Memperkuat kemitraan Taiwan dengan negara-negara NSP dan memperjuangkan peluang kerjasama bilateral maupun multilateral berdasarkan kekuatan Taiwan dalam perawatan medis, budaya, pariwisata, sains dan teknologi serta pertanian. Keempat, konektivitas regional: Mempromosikan kerja sama bilateral dan multilateral yang dilembagakan; meningkatkan status resmi negosiasi dan dialog bilateral; membangun kemitraan dengan negara-negara NSP melalui kerjasama internasional.

Pihak Perundingan Perdagangan Kantor Eksekutif Yuan akan menangani koordinasi dan integrasi, merumuskan rencana kerja yang berbeda untuk masing-masing negara-negara NSP, dan merundingkan berbagai proyek kerjasama dengan mitra penting.

Hubungan Taiwan dengan ASEAN dan Asia Selatan. ASEAN yang terdiri dari 10 negara. Pada akhir tahun 2015, negara ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (AEC), diintegrasikan ke dalam total jumlah populasi lebih dari negara perdagangan bebas Amerika dan Uni Eropa sebagai pasar terbesar ketiga di dunia (setelah Tiongkok dan India), dengan GDP mencapai USD 2,5 triliun, menjadikannya sebagai negara dengan perekonomian terbesar keenam di dunia.

Sejak tahun 2013, ASEAN menjadi kawasan tujuan investasi terbesar seluruh dunia. Pakar ekonomi Inggris di tahun 2016 juga menyatakan bahwa MEA pada tahun 2030 diperkirakan akan menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia, memiliki kemajuan potensial yang sangat diharapkan (New Southbound Policy, 2016).

Taiwan mengambil kesempatan ini untuk masuk ke pasar ASEAN. Investor Taiwan di negara-negara ASEAN berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki dan upah tenaga kerja yang rendah. Dengan berkembangnya negara-negara ASEAN, daya beli masyarakat secara bertahap menarik perhatian banyak negara, jumlah investasi meningkat dari tahun ke tahun, investasi asing hadir dengan skala perusahaan besar, menciptakan perubahan baru mendorong perekonomian negara-negara ASEAN tumbuh dengan pesat. Peluang pasar ASEAN yang besar menjadi perhatian industri dunia untuk berinvestasi di kawasan ASEAN.

Sedangkan di kawasan Asia Selatan walaupun terjadi krisis ekonomi internasional dalam beberapa tahun terakhir, tetapi India sebagai negara pertama Asia Selatan, mengalami pertumbuhan ekonomi yang bagus sehingga menarik perhatian perusahaan internasional termasuk investor Taiwan. Asia Selatan terdiri dari tujuh negara, urutan berdasarkan populasi penduduk, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan dan Maladewa, total lahannya seluas 4,48

juta kilometer persegi (Academiaedu, 2016). Jumlah penduduk India mencapai 1,3 miliar jiwa, menjadikan India sebagai negara terpadat kedua di dunia (Robyn, 2010).

Beberapa pandangan Taiwan terhadap kawasan Asia Selatan yaitu, *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)*. SAARC dibentuk pada tanggal 6 Januari 2004 pada saat penyelenggaraan KTT Asia Selatan ke-12 di ibukota Pakistan Islamabad, masing-masing negara anggota mengusulkan konsep perdagangan bebas, negara tersebut diantaranya Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal dan Sri Lanka, ketujuh menteri luar negeri berharap sebelum tahun 2016 dapat melaksanakan perdagangan bebas di wilayah itu dengan penghapusan tarif impor menjadi nol.

Setiap negara mendirikan zona perdagangan bebas atau wilayah pengolahan, kebanyakan menawarkan kepemilikan asing 100 persen dan menikmati 5 sampai 10 tahun pembebasan bea impor, ini telah menjadi lokasi investasi populer bagi pesaing Taiwan seperti Jepang, Korea dan negara lainnya. Pengembangan infrastruktur sebagai peluang investasi perdagangan. Pemerintah banyak membuka peluang pada investor asing berskala internasional melalui anggaran belanja tahunan. Oleh karena itu, diharapkan investor Taiwan juga dapat mempertimbangkan peluang ini.

3.1.1 Definisi *New Southbound Policy*

New Southbound Policy atau Kebijakan Baru ke Arah Selatan adalah suatu strategi ekonomi dan perdagangan Taiwan yang dibentuk pada tahun 2016 bertujuan untuk mendefinisikan peran penting Taiwan dalam pembangunan di kawasan Asia. Mendorong arah dan kekuatan baru dalam pembangunan ekonomi dan menciptakan masa depan yang bernilai. Untuk itu, pedoman kebijakan *New Southbound Policy* menetapkan prinsip-prinsip serta tujuan *New Southbound Policy*. Sebagai penentu arah upaya pemerintah dalam menyatukan sumber daya dan kekuatan dalam negeri serta memperlihatkan kepada masyarakat internasional bahwa Taiwan memiliki niat yang baik dalam meningkatkan kerjasama dan negosiasi yang lebih luas dengan negara-negara ASEAN dan Asia Selatan serta

Australia New Zealand. Sebagai upaya untuk mencapai pembangunan dan kemakmuran kawasan.

Kebijakan Baru Arah Selatan atau “*New Southbound Policy*” oleh pemerintah Taiwan adalah kebijakan yang berlandaskan pada prinsip yang saling menguntungkan. Upaya pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui 3 aspek, yaitu menjalin hubungan strategis dengan negara sahabat, menciptakan rantai ekologi industri dengan negara mitra kebijakan, serta memperkuat hubungan dengan masyarakat dan komunitas berbagai negara.

Pada tahun 2017, pemerintah Taiwan telah mengintegrasikan sumber daya dari kantor perwakilan di luar negeri dan meningkatkan pelaksanaan berbagai kebijakan, seperti melakukan uji coba bebas visa kepada Thailand, Brunei dan Filipina, memberikan hadiah kepada perusahaan Taiwan yang mengadakan perjalanan karyawan ke Taiwan, berpartisipasi dalam pameran wisata, menciptakan lingkungan wisata ramah Muslim serta meningkatkan pelayanan wisata dalam bahasa Asia Tenggara. Langkah-langkah dan kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan jumlah wisatawan asing dari Asia Tenggara hingga mencapai 2 juta pengunjung atau bertumbuh 20 persen, dengan perbandingan mencapai 1 banding 5 artinya terdapat 1 orang wisatawan Asia Tenggara untuk setiap 5 orang wisatawan asing (Ministry of Foreign Affairs Republic of China, 2018).

3.1.2 Tujuan *New Southbound Policy*

New Southbound Policy terdiri dari 2 tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan jangka panjang serta tujuan jangka pendek dan menengah. Pertama, tujuan umum dan tujuan jangka panjang, yaitu (1) meningkatkan kerjasama antara Taiwan serta negara-negara tujuan NSP baik di bidang ekonomi dan perdagangan, teknologi dan ilmu pengetahuan serta budaya. Menciptakan strategi kerjasama baru yang saling menguntungkan demi menguatkan “rasa komunitas ekonomi”. (2) membangun mekanisme dialog dan negosiasi yang luas: menciptakan kesepakatan bersama, menyelesaikan masalah dan perbedaan pendapat secara efektif; membangun rasa kepercayaan dan rasa komunitas secara bertahap.

Kedua, tujuan jangka pendek dan menengah, yaitu (1) memadukan tujuan nasional, kebijakan insentif, dan peluang bisnis untuk memacu serta memperluas hubungan timbal balik di bidang ekonomi dan perdagangan, investasi, serta budaya. (2) untuk mendorong Model Baru Pembangunan Ekonomi, mendukung industri untuk mengadopsi strategi “*Southbound*” Baru dalam merancang langkah selanjutnya. (3) untuk mengatasi hambatan pembangunan maka dibutuhkan banyak orang dengan kemampuan yang mumpuni untuk mendukung *New Southbound Policy*. (4) meningkatkan negosiasi dan dialog mengenai kerjasama ekonomi secara multilateral dan bilateral, menyelesaikan perselisihan serta perbedaan pendapat yang dapat memperkeruh hubungan antara Taiwan dengan negara-negara NSP.

Pemerintah Taiwan secara konsisten menekankan pentingnya swasembada pertahanan nasional. Jika Taiwan ingin mempertahankan kedaulatannya dan menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran regional, maka tidak dapat bergantung pada negara lain. Peningkatan kemampuan militer Taiwan sendiri adalah cara terkuat untuk menjamin keamanan nasional. Taiwan mungkin bukan negara yang besar tetapi sangat bertekad untuk mempertahankan kedaulatannya. Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata ROC, Tsai Ing-wen bertanggung jawab untuk memperkuat kemampuan tempur pertahanan nasional dan mempertahankan keamanan nasional.

Di bidang perdagangan dan ekonomi internasional, Taiwan memiliki Kebijakan Menuju Asia Selatan Baru sebagai strategi regional utama untuk wilayah Asia. Sejauh ini, Taiwan sudah berupaya menarik negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara untuk menjalin kerjasama perdagangan. Dalam periode Januari hingga Oktober tahun 2017, perdagangan bilateral Taiwan dengan 18 negara mitra Kebijakan Menuju Asia Selatan Baru mengalami pertumbuhan hampir 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor pariwisata dari negara-negara mitra kebijakan telah meningkat lebih dari 30 persen, dan saat ini terdapat lebih dari 31.000 siswa dari negara-negara tersebut yang sedang belajar di Taiwan.

Di bidang industri, Taiwan memiliki beberapa keunggulan dan kemampuan yang dapat dikembangkan ke arah selatan, seperti bidang petrokimia, pertanian dan perawatan medis. Kemudian akan mengintegrasikan kekuatan sektor publik dan swasta, serta memperkuat dan mengintegrasikan mekanisme pendukung. Taiwan akan melakukan upaya khusus untuk memberikan layanan konsultasi dan bantuan bagi usaha kecil dan menengah. Melalui sistem kerja kelompok, Taiwan mengharapkan dapat menciptakan rantai industri Arah Selatan Baru dengan negara-negara yang bersedia untuk bekerja sama. Pemerintah Taiwan secara matang meningkatkan kerja sama di bidang industri. Dibuktikan dengan Kementerian Ekonomi atau *Ministry of Economic Affairs* (MOEA) telah membuat layanan investasi satu pintu di Vietnam, Filipina, Indonesia, Myanmar, Thailand dan India untuk membantu kegiatan investasi dua arah. Pemerintah Taiwan juga menyediakan fasilitas kredit untuk usaha kecil menengah yang ingin berinvestasi di pasar Asia Tenggara, sehingga perusahaan Taiwan dan negara-negara sasaran Kebijakan Menuju Asia Selatan Baru dapat menerapkan kelebihanannya masing-masing dalam menciptakan kerja sama industri yang menguntungkan.

Pemerintah Taiwan juga mempromosikan *Official Development Assistance* (ODA) untuk membantu negara sahabat diplomatik dan negara sasaran Kebijakan Menuju Asia Selatan Baru untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan berbagai proyek pembangunan. Proyek seperti ini akan membantu baik pemerintah maupun swasta dalam memasuki pasar global.

Dalam bidang kesehatan dan lingkungan, pemerintah Taiwan meresmikan sebuah platform baru untuk bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dalam memberantas penyakit demam berdarah. Selain itu, pemerintah telah membangun pusat bantuan kemanusiaan di pulau Taiping, dan di pulau Dongsha (Pratas) telah dibangun stasiun pemantauan emisi gas rumah kaca. *Soft Power* seperti inilah yang menjadi kebanggaan Taiwan dan menjadi kekuatan untuk menciptakan stabilitas, perdamaian dan kemakmuran di wilayah Asia Pasifik.

Melalui *New Southbound Policy*, pemerintah Taiwan mendorong terjadinya pertukaran keahlian. Jumlah pelajar asing yang datang ke Taiwan terus bertambah, dan dengan wawasan internasional, para pelajar menjadi tenaga pendorong dalam mempromosikan kemakmuran regional di masa yang akan datang.

Pada tahun 2018, kebijakan luar negeri Taiwan *New Southbound Policy* akan beralih ke tahap promosi dan kerjasama yang lebih komprehensif. Taiwan akan terus meningkatkan fondasi kerja sama yang ada untuk mengembangkan kemitraan strategis dengan negara-negara mitra kebijakan. Tujuan utama dari Kebijakan Menuju Asia Selatan Baru adalah untuk menempatkan Taiwan di posisi yang menguntungkan dalam komunitas internasional. Di wilayah Asia Pasifik yang sangat dinamis, Taiwan siap untuk memainkan peran yang lebih penting dalam menciptakan kemakmuran dan stabilitas regional.

Hubungan lintas selat sangat penting untuk menjaga perdamaian dan kemakmuran regional. Presiden Tsai Ing-wen ingin masyarakat yakin bahwa pemerintah tidak akan gegabah dan hubungan lintas selat tidak akan menemui jalan buntu. Posisi Taiwan tidak berubah yaitu menjaga status quo. Inilah komitmen Taiwan terhadap kawasan ini dan dunia. Perdamaian, kemakmuran dan pembangunan di Asia adalah tanggung jawab bersama semua negara di kawasan tersebut. Oleh karena itu, isu lintas selat adalah isu perdamaian regional. Taiwan akan memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan regional dengan terus memperlihatkan niat baik dan memelihara hubungan lintas selat yang stabil, dan konsisten serta bermartabat dan saling menghormati, dalam kehidupan bersama dengan masyarakat dunia adalah cita-cita kolektif masyarakat Taiwan.

3.1.3 Prinsip-prinsip *New Southbound Policy*

Penerapan prinsip – prinsip “*New Southbound Policy*” sebagai berikut:

1. Menetapkan hasil jangka panjang, memperkuat rasa masyarakat ekonomi (*sense of economic community*)

Dalam hal ini, Taiwan sudah memiliki dasar yang kuat dan kondisi yang menguntungkan dalam pelaksanaan *New Southbound Policy*, berdasarkan pengalaman dari masa lalu yaitu untuk mencapai kesuksesan tidak dapat dengan

tergesa-gesa. Karena harus menentukan tujuan dan menetapkan hasil jangka panjang demi mencapai dan meningkatkan kemampuan dalam membangun kemitraan dengan negara-negara NSP.

2. Menentukan peran masa depan Taiwan dalam membangun kawasan

Taiwan ditempatkan dalam dalam rantai pasokan global. Taiwan mampu meraih kesuksesan dalam pembangunan ekonomi. Dalam ranah di Asia, Taiwan berperan penting sebagai penyedia modal dan teknologi. Taiwan mampu mengenalkan perannya dalam proses pembangunan kawasan. Unsur inti dari inovasi, kerja, dan pemerataan dimaksudkan untuk menyusun Model Baru bagi Pembangunan Ekonomi. Di masa mendatang, Taiwan berharap agar berperan sebagai pembaharu (innovator), penyebar (*sharer*) dan penyedia layanan.

3. Mengejar strategi empat mata rantai kunci: *Soft Power*, Rantai Pasokan, Menghubungkan Pasar Regional, Hubungan Antar Masyarakat:

- (1) Kekuatan utama Taiwan, sementara ini, terletak pada "*soft power*" yaitu dalam bidang seperti teknologi, sosial dan budaya. Taiwan berupaya menjadikan "*soft power*" sebagai inti dari strategi untuk menghubungkan Taiwan dengan negara-negara lain. Taiwan memiliki pengalaman yang cukup baik dalam bidang kesehatan, teknologi, pendidikan, kerjasama pertanian serta usaha kecil dan menengah yang terus dikembangkan dalam meningkatkan kerjasama multilateral dan bilateral dengan negara-negara NSP.
- (2) Rantai pasokan Taiwan terletak pada bidang perdagangan dan investasi. Guna menguatkan penyatuan rantai pasokan di berbagai sektor seperti, teknologi informasi dan komunikasi (ICT), industri dalam negeri, energi dan petrokimia, pertanian baru dan jasa keuangan. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk menciptakan kerjasama multilateral. Fokus kerjasama tersebut melibatkan usaha kecil dan menengah.
- (3) Untuk meningkatkan investasi dan perdagangan dua arah, maka diperlukan investasi infrastruktur lunak dan keras serta memperkuat hubungan dengan pasar regional. Negara-negara NSP tersebar di kawasan yang luas, memiliki

perbedaan dalam tingkat perkembangan, budaya, dan sistem hukum. Di masa mendatang, Taiwan mengupayakan membuka peluang bisnis yang besar dengan melakukan upaya aktif dan mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur di kawasan. Namun, negara Taiwan tetap menyesuaikan diri agar sejalan dengan undang-undang yang berlaku guna memperluas hubungan dengan pasar regional.

- (4) Memperkuat hubungan antar masyarakat adalah tugas pokok. Agar dapat terlaksana pertukaran dan penyatuan antar budaya di masa mendatang. Sumber daya pariwisata dan budaya dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan hubungan antar masyarakat atau *people-to-people* dalam menerapkan semangat baru *New Southbound Policy*.

4. Membina lebih banyak orang dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam mendukung “*New Southbound Policy*”

Kunci keberhasilan dari *New Southbound Policy* yaitu dapat memberdayakan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Dalam hal ini, pendidikan teknis dan kejuruan sangat dibutuhkan, peningkatan pembangunan industri, serta jumlah sumber daya manusia yang banyak dalam mendukung pelaksanaan *New Southbound Policy*. Pemerintah Taiwan berjanji untuk mendorong para imigran di Taiwan agar terlibat dengan melakukan pengajaran bahasa sehingga memiliki keahlian bahasa dalam pelaksanaan *New Southbound Policy*.

5. Mencapai kerjasama bilateral dan multilateral yang terlembaga

Secara konsisten meningkatkan kerjasama ekonomi yang terlembaga dengan mitra dagang utama dan mengambil bagian dalam proses penyatuan ekonomi kawasan. Adanya kesepakatan dalam perjanjian investasi dan perpajakan bilateral dengan negara-negara NSP.

6. Merencanakan seperangkat tindakan yang komprehensif tentang langkah-langkah yang terkoordinasi dan pengendalian risiko yang efektif

Lembaga pemerintah mempunyai peran yang tepat dengan merancang seperangkat tindakan/strategi yang terkoordinasi. Perlu adanya saluran dana yang nyaman, dukungan informasi dan teknis yang lengkap, serta upaya dengan bantuan asing untuk mendukung pelaksanaan *New Southbound Policy*. Kemudian perlu dilaksanakan manajemen risiko secara sadar akan risiko politik dan ekonomi dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Upaya mengendalikan risiko dengan cara membangun mekanisme peringatan dini dan tanggap darurat secara efektif.

7. Berpartisipasi aktif dalam kerjasama internasional

Taiwan memandang ASEAN dan Asia Selatan saat ini sebagai negara-negara penting yang pertumbuhan ekonominya meningkat dengan pesat. Bahkan negara Amerika Serikat, Jepang serta China memiliki strategi untuk menarik simpati negara-negara di ASEAN dan Asia Selatan. Untuk itu, Taiwan secara aktif ambil bagian dalam kerjasama internasional dengan membangun hubungan yang bersahabat dengan negara-negara ASEAN dan Asia Selatan.

8. Meningkatkan mekanisme pembicaraan dan dialog yang komprehensif

Misi penting dalam pelaksanaan *New Southbound Policy* yaitu terlibat dalam komunikasi dan dialog yang luas dengan negara-negara NSP. Taiwan harus meningkatkan mekanisme negosiasi dan dialog secara komprehensif. Di tambah dengan memperkuat kemampuan negosiasi internasional di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Urusan Ekonomi, dan lembaga-lembaga lain. Sehingga memiliki dialog yang komprehensif di berbagai tingkatan dengan negara-negara NSP. Dengan tujuan mengatasi hambatan dan rintangan yang berakar pada sistem dan kebijakan.

9. Interaksi dan kerja sama lintas selat yang beritikad baik

Dalam menjalin kerjasama ekonomi, kedua belah pihak mempunyai sumber daya dan potensi yang berbeda. Dengan membangun kerjasama diharapkan dapat meningkatkan kekuatan dalam bentuk kerjasama regional. Hubungan lintas-selat diupayakan untuk saling menguatkan bagi perdamaian dan pembangunan kawasan.

10. Memanfaatkan dengan baik keberadaan organisasi swasta dan vitalitas

New Southbound Policy akan diterapkan dalam sektor swasta, dengan memanfaatkan organisasi-organisasi swasta seperti kelompok-kelompok akademik, penelitian, agama budaya, industri serta asosiasi-asosiasi perusahaan investasi Taiwan dan LSM. Taiwan mendorong pihak-pihak sektor swasta untuk mengambil peran dalam pelaksanaan *New Southbound Policy*. Sehingga sektor swasta dapat membawa energi dan potensi mereka dalam mendukung pelaksanaan *New Southbound Policy*.

3.2 Kepentingan Ekonomi Taiwan di Negara Mitra NSP

Pada tahun 1970-an dan 1980-an pembangunan ekonomi Taiwan tumbuh pesat dengan menjadi salah satu Negara Industri Baru (*Newly Industrialising Countries*). Taiwan secara terbuka melakukan diplomasi ekonomi dengan negara-negara penerima bantuan Taiwan. Dengan bantuan yang diberikan oleh Taiwan, mengarah ke dampak positif terhadap hubungan bilateralnya. Misalnya, meningkatkan hubungan tidak resmi yang sudah ada, menjalin hubungan diplomatik serta mulai membentuk hubungan tidak resmi dengan negara lain. Penguatan perekonomian Taiwan terus berlanjut hingga pemilihan Presiden tahun 2016 yang dimenangkan oleh Presiden Tsai Ing-wen.

Pasca terpilihnya Presiden baru Taiwan, ada indikasi terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Taiwan yang baru. Taiwan kemudian membentuk *New Southbound Policy* (NSP) pada tahun 2016 dan berlangsung hingga saat ini. NSP dibentuk untuk membangun dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan serta Australia dan Selandia Baru. Ada beberapa bidang yang menjadi tujuan dari NSP, salah satunya bidang ekonomi.

Pada Januari 2018, *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*, memaparkan penyajian laporan penelitian tentang *New Southbound Policy (NSP)*. Dalam laporan tersebut, selama ini ASEAN menciptakan kondisi geopolitik yang berkembang bagi pertumbuhan ekonomi dan menarik berbagai negara untuk melakukan ekspansi di kawasan ASEAN. Taiwan tentu tidak tinggal diam. Taiwan berupaya untuk mendayagunakan potensi Taiwan agar terciptanya kerjasama mutualisme dengan ke-18 negara mitra NSP. Dalam bidang perdagangan, sumber daya, SDM serta relasi antar lembaga sehingga menciptakan kondisi pembangunan yang makmur dalam kawasan Asia. Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen mengatakan bahwa NSP adalah sebuah kebijakan yang terbuka, tidak bertentangan dengan program kerjasama regional lain, maka NSP diharapkan mampu untuk saling melengkapi dan menguntungkan bagi negara Taiwan serta ke-18 negara mitra NSP (MOFA, 2018).

Kemudian pada September 2018, Taiwan mengadakan seminar dengan *International Cooperation and Development Fund (ICDF)* mengenai e-commerce, pengembangan UKM dan ekonomi simbiosis (*Circular economy*) terhadap perwakilan dari 18 negara mitra NSP. Kegiatan ini sebagai upaya pemerintah Taiwan untuk mendorong pelaksanaan NSP dengan meningkatkan kerjasama dan membangun relasi antara perusahaan Taiwan melakukan ekspansi ke pasar Asia Tenggara dan Asia Selatan. Khususnya menciptakan hubungan dinamis dengan ASEAN dan India (MOFA, 2018). Lihat (Gambar 3.1).

Ekspor Taiwan tahun 2016

NO	Countries ITEMS	Electr onics	Machinery	Chemical plastics	Metals	Minerals	Textiles, furniture	Transport vehicles	Vegetables Foodstuffs, wood	Stone, glass
1	Indonesia	9.35%	19.30%	23.37%	13.46%	2.67%	21.83%	2.82%	6.20%	0.58%
2	Singapore	77.58%	5.20%	6.12%	1.50%	7.01%	0.33%	0.93%	0.71%	0.34%
3	Thailand	35.62%	13.16%	17.18%	18.68%	0.33%	5.93%	2.30%	5.45%	0.70%
4	Malaysia	59.05%	9.45%	11.91%	8.94%	5.00%	1.57%	0.55%	2.42%	0.58%
5	Philippines	30.30%	6.36%	5.09%	5.44%	44.19%	2.89%	3.62%	1.75%	0.16%
6	Vietnam	22.55%	13.74%	20.47%	11.30%	2.12%	20.15%	0.66%	8.45%	0.24%
7	Cambodia	1.25%	7.67%	9.68%	3.15%	0.13%	62.35%	5.95%	9.58%	0.08%
8	Laos	14.47%	9.59%	5.46%	0.58%	0.00%	61.23%	0.77%	6.52%	0.00%
9	Myanmar	5.46%	28.86%	17.03%	14.57%	0.38%	19.68%	1.31%	12.06%	0.41%
10	Brunei	8.37%	13.51%	13.84%	35.19%	0.16%	3.03%	2.65%	19.07%	2.42%
11	Bhutan	9.25%	61.24%	0.07%	4.17%	20.98%	0.00%	0.00%	0.33%	0.00%
12	Pakistan	5.15%	15.39%	31.22%	18.87%	0.56%	18.66%	7.10%	1.02%	1.80%
13	India	16.83%	21.31%	39.37%	9.61%	0.76%	5.90%	1.29%	2.16%	2.43%
14	Bangladesh	2.28%	17.52%	36.85%	8.38%	0.57%	27.57%	0.64%	5.82%	0.08%
15	Sri Lanka	3.48%	10.91%	16.63%	11.15%	0.41%	49.22%	0.45%	6.63%	0.56%
16	Nepal	18.25%	35.83%	24.56%	1.44%	0.04%	13.60%	2.61%	2.16%	0.09%
17	Australia	15.49%	22.62%	16.35%	18.26%	9.55%	3.95%	6.67%	5.53%	0.57%
18	New Zealand	10.80%	19.89%	20.12%	23.91%	0.09%	5.80%	11.13%	4.53%	2.01%

Gambar 3.1 Ekspor Taiwan pada Tahun 2016 (Sumber: diolah dari “Center for International Development at Harvard University (ATLAS)”, diakses dari website <http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=249&partner=undefined&product=undefined&productClass=HS&startYear=undefined&target=Product&year=undefined>, pada saat tanggal 8 Oktober 2018)

Berdasarkan data ekspor Taiwan pada tahun 2016 di atas, Taiwan terus berupaya untuk menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan negara mitra NSP khususnya pada bidang perdagangan. Jumlah ekspor Taiwan hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Kerjasama yang terjalin sebelum adanya NSP hingga terbentuknya NSP tahun 2016 membuahkan hasil. Meskipun potensi komoditas yang di tawarkan oleh Taiwan sama dengan komoditas China, namun Taiwan terus berupaya untuk mengembangkan barang produksinya untuk memenuhi pasar internasional. Lihat (Gambar 3.2).

Impor Taiwan tahun 2016

NO	Countries ITEMS	Electr onics	Machinery	Chemical plastics	Metals	Minerals	Textiles, furniture	Transport vehicles	Vegetables Foodstuffs, wood	Stone, glass
1	Indonesia	9.83%	8.78%	11.08%	8.47%	20.18%	12.56%	3.60%	24.69%	0.53%
2	Singapore	51.99%	24.62%	8.37%	1.09%	4.21%	0.55%	4.07%	3.13%	1.41%
3	Thailand	24.48%	25.11%	14.63%	6.90%	1.47%	2.08%	5.21%	17.57%	1.90%
4	Malaysia	45.85%	16.94%	9.11%	5.93%	6.27%	0.89%	1.39%	11.06%	2.03%
5	Philippines	65.40%	15.91%	1.98%	5.41%	5.41%	0.44%	0.73%	3.16%	0.99%
6	Vietnam	30.94%	7.33%	7.77%	6.77%	2.33%	22.61%	2.13%	16.73%	3.10%
7	Cambodia	2.39%	7.76%	6.11%	0.06%	0.00%	71.99%	1.04%	9.93%	0.05%
8	Laos	2.88%	0.00%	22.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	Myanmar	9.35%	19.54%	0.57%	0.78%	0.00%	22.09%	0.00%	31.46%	11.64%
10	Brunei	2.52%	33.68%	0.00%	1.16%	0.00%	0.09%	59.07%	2.53%	0.00%
11	Bhutan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	79.17%	0.00%
12	Pakistan	0.04%	1.43%	0.20%	3.12%	89.33%	2.89%	0.01%	2.20%	0.38%
13	India	3.66%	5.99%	17.22%	12.20%	51.51%	2.37%	0.45%	3.46%	2.93%
14	Bangladesh	1.77%	0.72%	0.80%	6.10%	0.00%	19.13%	0.00%	69.17%	0.00%
15	Sri Lanka	0.98%	3.29%	12.37%	0.17%	15.04%	24.17%	0.03%	38.93%	2.85%
16	Nepal	0.00%	0.26%	3.58%	38.68%	0.00%	8.29%	0.00%	2.17%	0.00%
17	Australia	1.90%	5.37%	13.79%	45.85%	11.38%	0.44%	1.16%	19.29%	0.48%
18	New Zealand	7.60%	10.35%	6.35%	2.87%	0.17%	0.78%	5.16%	65.71%	0.05%

Gambar 3.2 Impor Taiwan pada tahun 2016(Sumber: diolah dari “Center for International Development at Harvard University (ATLAS)”, diakses dari website dengan alamat <http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=249&partner=undefined&product=undefined&productClass=HS&startYear=undefined&target=Product&tradeDirection=import&year=undefined> , pada tanggal 8 Oktober 2018)

Tidak hanya dalam bidang ekspor saja, Taiwan juga membutuhkan bantuan dari negara lain khususnya negara mitra NSP dengan mengimpor barang-barang yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Taiwan. Meskipun jumlah impor barangnya tidak setinggi jumlah ekspor Taiwan ke negara mitra NSP tetapi dapat dibuktikan apabila ada hubungan timbal balik antara Taiwan dengan negara mitra NSP dalam bidang ekspor dan impor.

Pemerintah Tsai telah mengalokasikan sumber daya yang signifikan ke NSP: Anggaran inisiatif meningkat 63 persen dari 131 juta dollar pada tahun 2017 menjadi 241 juta dollar pada tahun 2018. Bagian terbesar dari anggaran didedikasikan untuk Kementerian Urusan Ekonomi sebesar 96,1 juta dollar dan Departemen Pendidikan sebesar 56,5 juta dollar. Selanjutnya, pemerintah Tsai mengumumkan rencana pembiayaan sebesar 3,5 milyar dollar untuk membantu negara mitra NSP dalam bidang pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2017, ekspor Taiwan ke ASEAN mencapai 58,57 milyar dollar, naik 14,2 persen dari

tahun 2016. Terhitung dari Januari 2016 hingga April 2018, ASEAN telah menerima lebih dari 86 persen ekspor Taiwan ke negara mitra NSP (Brookings, 2018).

Kerjasama yang terjalin antara Taiwan dengan negara mitra NSP terus berlangsung hingga saat ini. Dalam pidato perayaan HUT ke-31 *Democratic Progressive Party* (DPP), Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen mengatakan NSP merupakan pedoman utama dari kebijakan luar negeri Taiwan. Sejak tahun 2016 hingga 2017, Taiwan telah bekerja keras untuk berperan lebih aktif di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, pariwisata dan budaya.

Sejak Februari 2017, jumlah wisatawan dari negara-negara mitra NSP meningkat sebesar 76 persen, nilai perdagangan meningkat 19,39 persen, jumlah pelajar asing mengalami pertumbuhan sebesar 10 persen. Peningkatan jumlah wisatawan, nilai perdagangan dan jumlah pelajar asing dari negara mitra NSP terus menunjukkan pertumbuhan, membuktikan bahwa kebijakan NSP yang tengah diusung oleh pemerintah ini berhasil mendekatkan Taiwan dengan dunia internasional (MOFA, 2017).

Pada Januari 2018, Kementerian Keuangan ROC mengumumkan nilai ekspor-impor per Desember 2017 mencapai 29.51 milyar dollar atau meningkat 14.8 persen. Nilai ekspor pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 13.2 persen, dan nilai impor sebesar 12.6 persen (MOFA, 2018). Produk Taiwan sangat kompetitif di pasar internasional disebabkan industri plastik Taiwan memiliki rantai industri yang sangat lengkap, sehingga memungkinkan untuk berekspansi ke pasar Asia Tenggara. Pada kenyataannya di tengah keterisolasiannya di mata internasional, Taiwan terus berupaya untuk tetap mempertahankan hubungan dagang yang sudah terjalin demi mempertahankan eksistensi Taiwan meskipun terjadi pemutusan atau tidak adanya hubungan diplomatik yang terjalin sebelumnya. Perdagangan menjadi salah satu harapan bagi Taiwan untuk menjalin interaksi dengan negara lain dan juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kerjasama di bidang lain. Tidak hanya kepentingan perdagangan saja, jumlah

investasi Taiwan ke negara mitra NSP pun membuahkan hasil. Bisa di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 *Flows of Inward Foreign Direct Investment (FDI) by Host Country and Source Country* (dalam persentase)

NO	HOST COUNTRY	SOURCE COUNTRY	Year			
			2014	2015	2016	2017
1.	Brunei	Taiwan	0,00%	0,003%	-0,001%	0,00%
2.	Cambodia	Taiwan	4,89%	3,03%	2,47%	7,57%
3.	Indonesia	Taiwan	3,50%	0,84%	0,58%	0,56%
4.	Laos	Taiwan	0,06%	0,90%	0,03%	0,04%
5.	Malaysia	Taiwan	0,57%	6,06%	2,10%	9,01%
6.	Myanmar	Taiwan	0,00%	0,003%	0,02%	0,24%
7.	Philippines	Taiwan	4,61%	7,28%	6,65%	3,73%
8.	Singapore	Taiwan	66,31%	48,49%	59,21%	21,52%
9.	Thailand	Taiwan	-0,66%	4,66%	4,67%	31,49%
10.	Vietnam	Taiwan	20,72%	28,74%	24,27%	25,75%

(Sumber: diolah dari ASEAN Statistical. 2018. *ASEAN Statistics Division*. Diakses melalui aseanstats.org. Pada 8 Oktober 2018)

Berdasarkan data dari tabel 3.1, jumlah investasi Taiwan ke negara-negara ASEAN cenderung meningkat setiap tahun terhitung dari tahun 2014-2016. Pada tahun 2014, jumlah tertinggi FDI Taiwan terhadap negara Singapura. Tahun 2015, meskipun mengalami penurunan namun negara Singapura masih tertinggi. Kemudian pada tahun 2016, jumlah FDI Taiwan terhadap Singapura mengalami peningkatan dan masih yang tertinggi. Sampai pada tahun 2017, jumlah FDI tertinggi berada pada negara Thailand.

Pada tahun 2017, menurut Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan, investasi Taiwan di enam negara ASEAN terbesar di Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, tumbuh lebih dari 25 persen dari tahun 2016 menjadi 2,82 milyar dollar. Investasi masuk ke Taiwan dari negara mitra NSP meningkat hampir 25 persen pada tahun 2017. ASEAN mengalahkan negara-negara

NSP lainnya seperti negara India, Australia, dan New Zealand. Meskipun sulit untuk mengisolasi dampak dari negara-negara tujuan NSP pada bidang perdagangan dan investasi Taiwan, namun keterlibatan ekonomi dengan negara-negara NSP merupakan keputusan yang baik untuk meningkatkan citra positif Taiwan (MOEAIC, 2018).

Investasi Taiwan yang besar terhadap negara lain membawa Taiwan pada peningkatan hubungan bilateral. Investasi digunakan sebagai alat untuk kegiatan tawar-menawar Taiwan dengan negara lain. Terjadi hubungan timbal balik antara Taiwan dengan negara penerima investasi Taiwan yaitu investor Taiwan diberi kemudahan dan menguatkan kembali posisi investasi Taiwan di negara lain. Maka dari itu untuk wilayah ASEAN masih menjadi rekan yang menjanjikan bagi Taiwan.

Adanya rasa kepercayaan yang semakin meningkat terbentuk oleh negara-negara mitra NSP terhadap Taiwan. Demi tercapainya tujuan NSP maka Taiwan terus berupaya untuk mengembangkan kerjasama dengan negara mitra NSP melalui kerjasama SDM yang menarik minat imigran asing untuk bekerja di Taiwan. Berdasarkan data dari *International Labour Organization* (ILO), jumlah pekerja asing tertinggi yaitu negara Indonesia. Selama ini kerjasama antara Taiwan-Indonesia cenderung kepada kerjasama imigran asing, pendidikan, pertanian serta produk bahan kimia.

Tabel 3.2 *Nationals registered to work abroad in Taiwan in 2014*

NO	COUNTRIES	JUMLAH PEKERJA
1.	Indonesia	82,665
2.	Philippines	58,681
3.	Vietnam	62,124
4.	Thailand	37,105

(Sumber: diolah dari International Labour Organization. 2015. *Analytical report on the international labour migration statistics database in ASEAN*. Pada 8 Oktober 2018)

Berdasarkan tabel 3.2, *International Labour Organization* (ILO) memberikan laporan terkait jumlah pekerja negara-negara di Asia Tenggara yang bekerja di Taiwan. Taiwan telah menerima banyak pekerja yang tertinggi berasal dari Indonesia terhitung sampai tahun 2014. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Badan Nasional untuk Penempatan dan Perlindungan Bahasa Indonesia Pekerja (BNP2TKI), lebih dari 78.000 pekerja Indonesia bermigrasi ke Taiwan pada tahun 2011. Jumlahnya meningkat menjadi sekitar 82.000 di 2014, tetapi turun menjadi sekitar 63.000 di 2015 dan 2016 (BNP2TKI, 2016).

Profil ekonomi Taiwan di negara-negara Asia Tenggara juga tergantung pada impor pekerja asing dari wilayah tersebut. Taiwan tertarik untuk mempekerjakan pekerja asing karena salah satu faktornya yaitu pekerjaannya dihargai dengan murah. Sebagai negara industri, tentu Taiwan membutuhkan jumlah pekerja yang banyak, dibuktikan dengan tingginya tingkat pekerja asing yang bersaing di Taiwan. Taiwan secara terbuka membantu para pekerja untuk mencari suaka di Taiwan dengan memberikan beberapa kemudahan, salah satunya meningkatkan diplomasi budaya negara-negara mitra NSP di Taiwan mulai dari bahasa serta fasilitas yang diberikan oleh Taiwan.

Taiwan melihat semakin banyak anak muda mencari pekerjaan di Asia Tenggara dan India. Jumlah orang Taiwan (antara usia 25-29 tahun yang berangkat bekerja di Asia Tenggara meningkat sebesar 62 persen. Pada tahun 2017, jumlah SDM yang mengajukan permohonan lowongan pekerjaan di kawasan ASEAN naik sebesar 33 persen dari tahun 2016 menjadi 53.137 orang (Taiwannews, 2018).

Pemerintah Taiwan tidak menganggap arus keluar SDM ke kawasan Asia Tenggara sebagai ancaman. Kenyataannya, pemerintahan Tsai Ing-wen telah mendorong kerjasama dan pengembangan dengan negara-negara Asia Tenggara sebagai keseriusan menjalankan NSP.

Tabel 3.3 Kebijakan Taiwan dalam Bidang Ekonomi

NO.	TANGGAL	KEBIJAKAN
1.	2 Januari 2017	<i>Office of Trade Negotiations</i> (OTN) mendirikan Pusat Pelayanan Kebijakan Menuju Asia Selatan Baru
2.	30 Maret 2017	Forum Kerja Sama Industri Taiwan-Indonesia 2017
3.	6 Juni 2017	Penandatanganan MOU <i>Taiwan External Trade Development Council</i> (TAITRA) Taiwan dengan <i>Federation of Information Technology Industry</i> (FITIS) Sri Lanka
4.	27 Juli 2017	Forum Kerja Sama Industri Taiwan-Thailand
5.	30 Agustus 2017	Seminar Pengkajian Penanganan Bidang Medis Taiwan
6.	September 2017	Kesepakatan kerjasama di bidang medis Taiwan dan Australia
7.	23 September 2017	<i>Asia Pacific Culture Day</i> 2017
8.	28 September 2017	Forum Kerja Sama Industri Taiwan-Filipina 2017
9.	10 Oktober 2017	Pidato Kenegaraan Presiden Tsai Ing-wen dalam HUT ROC 2017
10.	10 Oktober 2017	Pembentukan <i>Taiwan Asia Exchange Foundation</i>
11.	11 Oktober 2017	Presiden Tsai Menghadiri Pembukaan Yushan Forum 2017 dengan tema “Pembinaan Konektivitas Ekonomi dan Sosial dengan Asia Tenggara dan Asia Selatan”
12.	11 Oktober 2017	Konferensi Urusan Internasional 2017
13.	12 Oktober 2017	Taiwan-India <i>Industrial Collaboration Summit</i> 2017

14.	16 Oktober 2017	Presiden Tsai Mengundang Pengusaha Diaspora Thailand untuk Berinvestasi di Taiwan
15.	20 Oktober 2017	Dorongan Presiden Taiwan Regenerasi Dalam Industri Pertanian
16.	20 Oktober 2017	Forum Bisnis dan Pertukaran Budaya Kreatif Taiwan-Thailand
17.	2 November 2017	Lokakarya Fasilitasi Perdagangan Khusus Wilayah ASEAN dan Asia Selatan oleh <i>International Cooperation Development Fund (ICDF)</i>
18.	9 November 2017	<i>APEC Women and the Economy Sub-Fund</i>
19.	9 November 2017	Taiwan Expo 2017 Malaysia
20.	23 November 2017	<i>Taiwan Corporate Sustainability Awards</i>
21.	7 Desember 2017	Presiden Tsai: Tingkatkan Kerja Sama Internasional di Bidang Teknologi Medis
22.	11 Desember 2017	59 institusi pendidikan tinggi Taiwan dan Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama
23.	14 Desember 2017	Penandatanganan <i>MOU on Promotion of Industry Collaboration</i> India dan Taiwan
24.	20 Desember 2017	Upacara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Taiwan-Indonesia di Bidang Geodesi dan Geomatika
25.	29 Desember 2017	Presiden Tsai Menghadiri Konferensi Pers Akhir Tahun 2017
26.	1 Februari 2018	<i>Council of Agriculture</i> mendirikan area produksi di Indonesia seluas 1.000 hektar
27.	1 Maret 2018	Festival Wisata 2018

28	6 Maret 2018	Penandatanganan MOU antara <i>Taiwan's external trade council</i> (TAITRA) dengan <i>Malaysia Retail Chain Association</i>
29.	9 Maret 2018	<i>Taiwan Cooperative Bank</i> buka cabang di Kamboja
30.	22 Maret 2018	Indonesian Week 2018
31.	28 Maret 2018	Penandatanganan MOU SBS Transit (Singapore) dengan Taipei Metro, dan Metro Consulting Service Ltd (Taiwan)
32.	29 Maret 2018	Taiwan Expo 2018 Indonesia
33.	13 April 2018	Penandatanganan MOU antara <i>Taiwan External Trade Development Council</i> (TAITRA) dengan Vietnam dan Indonesia
34.	4 Juni 2018	Kerjasama MOHW di kawasan Asia Tenggara
35.	28 Juni 2018	Penandatanganan MOU Taiwan dan Indonesia di bidang pertanian
36.	5 Juli 2018	Konferensi pers Taiwan-Vietnam <i>Smart Startup Park</i>
37.	20 Juli 2018	Taiwan Tandatangani MOU Bidang Migas dengan Vietnam tingkatkan Investasi di Asia Tenggara
38.	26 Juli 2018	Pengumuman hasil Survei Tren dan Konsumsi Wisatawan di Kota Taipei Tahun 2017
39.	1 Agustus 2018	" <i>Koo-idea Campus</i> " bidik Indonesia, Vietnam dan Laos
40.	6 Agustus 2018	Taiwan-Indonesia <i>Industrial Collaboration Summit</i> 2018
41.	8 Agustus 2018	Peresmian <i>Taiwan-Asia Exchange Foundation</i> (TAEF)

42.	15 Agustus 2018	Penandatanganan MOU <i>Taiwan Water Corporation</i> dengan Indonesia
43.	22 Agustus 2018	Vaksin <i>Atrophic Rhinitis</i> milik Taiwan masuk ke pasar Thailand
44.	7 September 2018	<i>Asia-Pacific Mercury Monitoring Network</i> ke-7 kerjasama trilateral antara Taiwan, AS dan Filipina

(Sumber: diolah dari Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). 2018. *New Southbound Policy Portal*. Di akses melalui <https://nspp.mofa.gov.tw/nsppe/> Pada 8 Oktober 2018)

3.2.1 Kepentingan Ekonomi China di Negara Mitra NSP

Lihat (Gambar 3.3).

Imports and Exports of Goods by Major Countries and Regions and the Growth Rates in 2017

Country or region	Exports (100 million yuan)	Increase over 2016 (%)	Proportion of the total (%)	Imports (100 million yuan)	Increase over 2016 (%)	Proportion of the total (%)
European Union	25199	12.6	16.4	16543	20.2	13.3
United States	29103	14.5	19.0	10430	17.3	8.4
ASEAN	18902	11.9	12.3	15942	22.8	12.8
Japan	9301	8.9	6.1	11204	16.3	9.0
Hong Kong, China	18899	-0.4	12.3	495	-54.9	0.4
Republic of Korea	6965	12.6	4.5	12013	14.4	9.6
Taiwan, China	2979	12.2	1.9	10512	14.5	8.4
Brazil	1962	35.2	1.3	3974	31.4	3.2
India	4615	19.8	3.0	1107	42.4	0.9
Russia	2906	17.8	1.9	2790	31.0	2.2
South Africa	1004	18.4	0.7	1649	12.1	1.3

Gambar 3.3 Impor Dan Ekspor Barang oleh Negara dan Wilayah Utama dan Tingkat Pertumbuhan pada tahun 2017 (Sumber: diolah dari “China Statistical Yearbook, 2017”, di akses dari http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201802/t20180228_1585666.html, pada tanggal 3 November 2018)

Menurut data dari buku tahunan statistik China, hampir setiap kawasan meningkat jumlah ekspor-impornya dengan China dengan jarak hanya 1 tahun. ASEAN menempati posisi ketiga sebagai kawasan yang melakukan ekspor tertinggi sepanjang 2016-2017 meningkat senilai 11,9 persen. Selanjutnya ada negara India

yang menempati posisi 9 dari 11 kawasan eksportnya dengan China senilai hampir 20 persen di tahun 2017. Meskipun ada upaya dari Taiwan untuk membentuk kebijakan perdagangan baru dengan negara-negara tujuan NSP namun nyatanya Taiwan belum dapat sepenuhnya mandiri tanpa bantuan dari China. Ekspor China terhadap Taiwan mengalami peningkatan sebesar 12,2 persen di tahun 2017 dan menempati posisi ketujuh. Di tambah lagi, negara-negara tujuan NSP menjadi target China bahkan Amerika Serikat sekalipun juga menikmati pasar China.

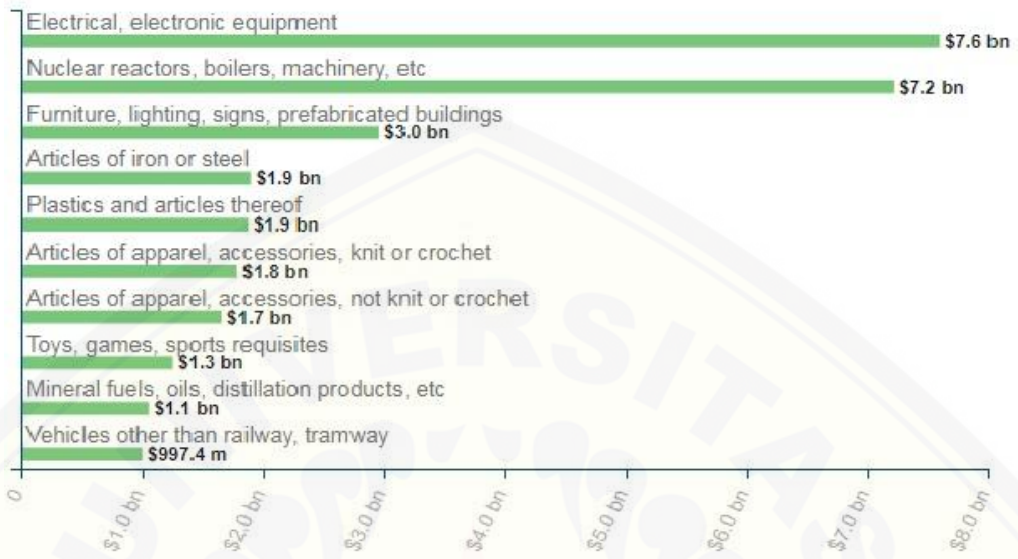
Tidak hanya hubungan kerjasama Taiwan dan ASEAN saja, China terus mengembangkan potensi perekonomiannya, hingga ke kawasan Oceania salah satunya yaitu Australia yang dijelaskan berdasarkan gambar di bawah ini:

Australia's trade and investment relationship with China

Australian merchandise trade with China, 2017 (A\$m)		Total share	Rank	Growth (yoy)
Exports to China	100,184	33.2%	1st	21.8%
Imports from China	64,524	22.4%	1st	8.4%
Total merchandise trade (exports + imports)	164,708	27.9%	1st	16.2%
Major Australian exports, 2017 (A\$m)		Major Australian imports, 2017 (A\$m)		
Iron ores & concentrates	51,660	Telecom equipment & parts		7,468
Coal	11,792	Computers		5,463
Wool & other animal hair (incl tops)	2,741	Furniture, mattresses & cushions		2,758
Copper ores & concentrates	1,970	Prams, toys, games & sporting goods		2,405
<i>*Includes \$11b of confidential items and special transactions, estimated to be mainly LNG, crude petroleum, barley, alumina & manganese ores, 11% of total exports.</i>				
Australia's trade in services with China, 2017 (A\$m)		Total share	Rank	Growth (yoy)
Exports of services to China	15,812	18.7%	1st	17.9%
Imports of services from China	2,873	3.3%	9th	2.0%
Major Australian services exports, 2017 (A\$m)		Major Australian services imports, 2017 (A\$m)		
Education-related travel	10,017	Personal travel excluding education		1,255
Personal travel excluding education	3,727	Transport		713
Australia's investment relationship with China, 2017 (A\$m)		Total	FDI	
Australia's investment in China		77,099	13,506	
China's investment in Australia		64,954	40,688	

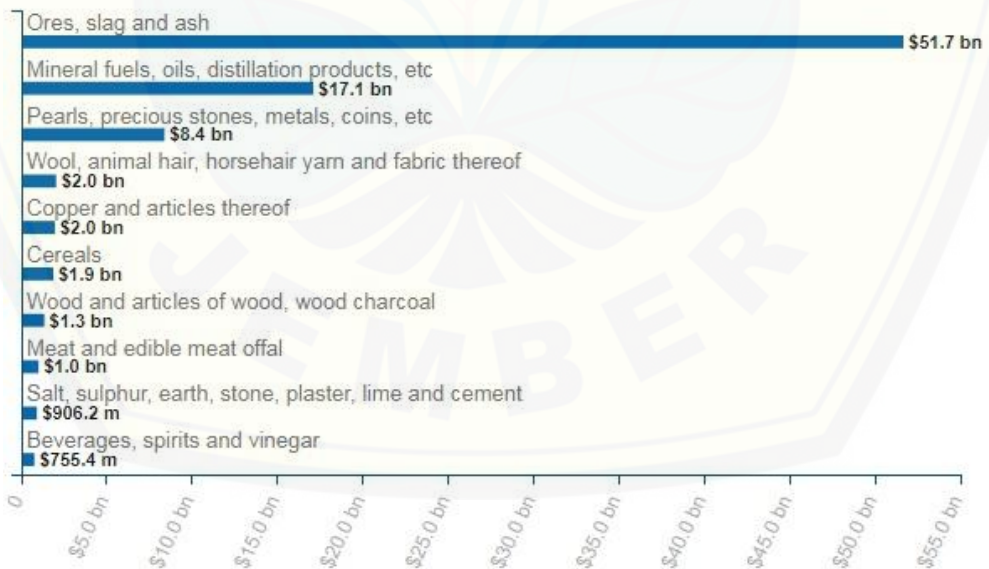
Gambar 3.4 Hubungan Perdagangan dan Investasi Australia dengan China (Sumber: diolah dari "Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade 2017", di akses dari <https://dfat.gov.au/trade/resources/Documents/chin.pdf> , pada tanggal 3 November 2018)

China - Top-10 exports of goods to Australia in 2017



(a)

China - Top-10 imports of goods from Australia in 2017



(b)

Gambar 3.5 (a) 10 Barang Utama Ekspor ke Australia (b) 10 Barang Utama Impor dari Australia pada tahun 2017 (Sumber: diolah dari “The UN International Trade Statistics Database (UN Comtrade)”, diakses dari website dengan alamat <https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-vis/?reporter=156&partner=36&type=C&year=2017&flow=2&commodity>, pada tanggal 3 November 2018)

Menurut data dari *Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade* pada tahun 2017, nilai impor Australia dari China sebesar 22,4 persen khususnya pada produk peralatan telekomunikasi, komputer, furnitur, serta mainan. Serta nilai impor jasa dari China sebesar 3,3 persen. Kemudian FDI China ke Australia sebesar 40.668 A\$m (Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, 2017).

The China–Australia Free Trade Agreement atau Perjanjian Perdagangan Bebas China – Australia (ChAFTA) mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2015. ChAFTA adalah jalan bagi fase berikutnya hubungan ekonomi Australia dengan China. Perjanjian ini memberikan manfaat besar bagi Australia, meningkatkan posisi kompetitif Australia di pasar China, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. ChAFTA membuka peluang signifikan bagi Australia di China, yang merupakan pasar ekspor barang dan jasa terbesar di Australia, menyumbang hampir sepertiga dari total ekspor, dan sumber investasi asing yang terus berkembang.

Tidak hanya kegiatan ekspor dan impor barang China ke negara lain, *Foreign Direct Investment* (FDI) China terus berkembang ke negara mitra seperti ASEAN, Asia Selatan, Taiwan, Australia, New Zealand bahkan Amerika Serikat seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 FDI China Tahun 2014-2016

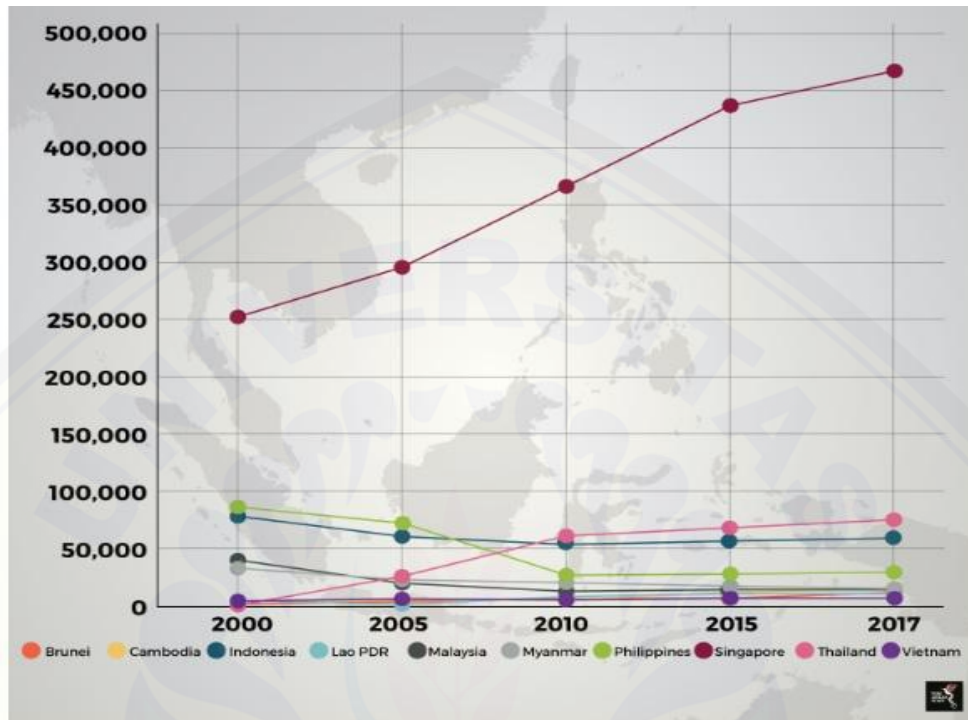
(USD 10.000)

No.	Countries	Year	
		2014	2016
1.	Brunei	7094	6567
2.	Cambodia	312	-
3.	Indonesia	7802	6399
4.	Malaysia	15749	22113
5.	Myanmar	585	2
6.	Philippines	9707	7760
7.	Singapore	582668	604668
8.	Thailand	6052	5615
9.	Vietnam	7	-
10.	Pakistan	2323	65
11.	India	5075	5181
12.	Bangladesh	15	7
13.	Sri Lanka	-	20
14.	Nepal	22	-
15.	Australia	23853	26264
16.	New Zealand	4748	3182
17.	Taiwan	201812	196280
18.	United States	237074	238601

(Sumber: diolah dari China Statistical Yearbook. 2015-2017. *New Statistical Yearbooks Published by China Statistics Press*. Di akses melalui <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm>, <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm>. Pada tanggal 3 November 2018)

Menurut tabel 3.4, jumlah FDI China tertinggi berada pada negara Singapura terhitung dari tahun 2014-2016. Kemudian negara Malaysia di posisi kedua dan negara Australia di posisi ketiga. China mengalami peningkatan jumlah

FDI dengan negara-negara tujuan NSP namun jumlah FDI China-Taiwan mengalami penurunan di tahun 2016. Sektor *Foreign Direct Investment* (FDI) China tertinggi berada pada sektor manufaktur.



Source: United Nations (UN) Population Division

Gambar 3.6 Total Imigran China di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2000-2017 (Sumber: diolah dari “United Nations (UN) Population Division”, di akses dari <https://theaseanpost.com/article/chinese-labour-migration-southeast-asia.htm> , pada saat tanggal 3 November 2018)

Berdasarkan gambar 3.9, terhitung dari tahun 2000-2017 jumlah imigran China ke negara Singapura meningkat dengan pesat hingga mencapai lebih dari 450.000 jiwa. Upaya China untuk terlibat dalam pasar ASEAN, Asia Selatan serta Australia dan New Zealand meliputi hampir berbagai bidang. Keterlibatan China tidak hanya terbatas pada ekspor-impor, FDI namun juga berlanjut pada sumber daya manusia. Jumlah populasi China pada tahun 2017 sebesar 1.379.302.771 jiwa, merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia.

Perkiraan oleh Divisi Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa jumlah pendatang China terus meningkat dilihat dari jumlah mereka di Asia Tenggara. Emigrasi China ke Asia Tenggara salah satunya didorong oleh *Belt dan Road Initiative* (BRI). Bersamaan dengan aliran investasi asing langsung China yang menguntungkan ke proyek-proyek infrastruktur.

3.2.2 *Belt dan Road Initiative* (BRI)

Pada awalnya inisiatif BRI ini disebut *One Belt and One Road* (OBOR) yang di perkenalkan pada akhir tahun 2013. Kemudian pada pertengahan tahun 2016, OBOR diganti menjadi *Belt dan Road Initiative* (BRI) yang berbasis pada Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (SREB) yaitu melalui rute daratan dan Jalur Sutra Maritim (MSR) yaitu melalui lintas samudra. China akan memajukan BRI secara komprehensif untuk memberi manfaat bagi negara-negara peserta lainnya melalui *win-win cooperation*.

China terus berupaya untuk memfasilitasi kebijakan, infrastruktur, perdagangan, keuangan, dan konektivitas *people-to-people* dan mencapai konsensus dengan lebih banyak negara untuk kerjasama *Belt and Road*. Kerjasama China di Koridor Ekonomi China-Pakistan, Koridor Ekonomi China-Laos, dan Koridor Ekonomi China-Myanmar, di pelabuhan Piraeus dan pelabuhan Kyaukpyu, di jalur kereta api China-Laos dan kereta api China-Thailand di Asia dan proyek kereta api lainnya di Afrika, Eropa dan Amerika Latin, akan memperkuat kekuatan pendorong baru untuk dan lebih meningkatkan kerjasama *Belt and Road* serta meningkatkan pembangunan negara dan wilayah di sepanjang rute tersebut (Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China, 2017).

Hubungan ekonomi antara ASEAN dan China dalam mendukung kemitraan strategis mereka telah berkembang sejak awal 1990-an ketika China melakukan reformasi berorientasi ke luar dan bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO). Keunggulan China berada pada sektor manufaktur, sehingga China memimpin dalam ekspor manufaktur.

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) berupaya untuk mengurangi tarif perdagangan antar kawasan regional. Selain penghapusan tarif, perjanjian itu menjanjikan integrasi lebih dalam yang mencakup bidang jasa, investasi asing dan langkah-langkah yang menggabungkan fasilitasi perdagangan. ASEAN adalah mitra dagang terbesar ketiga di China. Investasi dua arah telah berkembang, dengan ASEAN menjadi tujuan investasi terbesar keempat China dan sumber investasi asing langsung (FDI) terbesar ketiga. Kunci dari visi ASEAN-China tentang kemitraan strategis adalah kerja sama ekonomi. Selain mempromosikan perdagangan dua arah barang dan jasa, kemudian meningkatkan FDI dan membangun infrastruktur di negara-negara ASEAN. Namun di lain sisi, anggota ASEAN juga sedikit merasa waspada berurusan dengan kemurahan hati ekonomi China.

ASEAN dan China sepakat untuk meningkatkan kinerja ACFTA untuk memperdalam kerja sama di bidang pertanian, sumber daya manusia, investasi dan teknologi informasi. ACFTA pertama kali diusulkan pada tahun 2000 saat itu banyak negara ASEAN yang mengalami krisis keuangan pada tahun 1997-1998 dan berjuang dengan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan kesepakatan *ASEAN-China Summit* yang diselenggarakan pada tahun 2001, ACFTA sudah terbentuk dalam waktu 10 tahun. Atas dasar itulah, ACFTA mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2010. Pada tahun 2018, ASEAN dan China memperluas lingkup kerja sama mereka ke bidang-bidang baru, termasuk *e-commerce*. Dengan Revolusi Industri 4.0, berupaya untuk membangun kerjasama di bidang inovasi teknologi dan ekonomi *digital* (Sanchita, 2018).

3.3 Kepentingan Politik Taiwan di Negara Mitra NSP

Pembentukan kebijakan NSP berfokus pada kepentingan perdagangan antara Taiwan dengan negara mitra NSP. Taiwan terus berupaya untuk meningkatkan hubungan semi-formal dengan negara-negara Asia dan sekitarnya. Namun masih sulit bagi Taiwan untuk mendapatkan pengakuan secara resmi dari negara lain meskipun telah lama menjalin hubungan dalam bidang lain, seperti ekonomi.

Hingga tahun 2017, hanya 20 negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan atau yang mengakui Taiwan sebagai negara yang utuh, yaitu: *In Latin America and the Caribbean*: Belize, El Salvador, Haiti, Nicaragua, St Kitts and Nevis, St Vincent & the Grenadines, the Dominican Republic, Guatemala, Paraguay, Honduras and Saint Lucia. *In Africa*: Burkina Faso and Swaziland. Lalu *In Europe*: The Holy See (Vatican). Kemudian *In the Pacific*: Kiribati, Nauru, the Solomon Islands, Tuvalu, the Marshall Islands and Palau (BBC, 2017). Namun pada tahun 2018, Dominican Republic dan Burkina Faso memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan (Taiwannews, 2018). Setelah terbentuknya NSP pada tahun 2016 hingga tahun 2018, masih belum menumbuhkan pengakuan negara mitra NSP terhadap kedaulatan Taiwan.

Partisipasi Taiwan dalam Badan Internasional yaitu Taiwan mendapat keanggotaan penuh di 37 organisasi antar pemerintah (IGO) atau badan-badan pendukung lainnya. Taiwan berpartisipasi dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam forum APEC dengan nama Cina Taipei. Selain itu, Taiwan memiliki kedudukan atau status lain di 22 IGO lainnya atau badan-badan pendukungnya.

Saat ini, Taiwan juga berupaya menjadi pengamat resmi dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) serta INTERPO. Meskipun keanggotaan penuh di Inggris saat ini masih jauh, pemerintah Taiwan terus berusaha untuk berpartisipasi di lembaga dan mekanisme khusus PBB yang penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan bangsa, termasuk WHO, *International Civil Aviation Organization (ICAO)* dan *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* (ROC Yearbook, 2016).

China mengusahakan agar Taiwan dalam organisasi APEC menggunakan nama "Chinese Taipei," sebagai gelar resmi yang digunakan untuk Taiwan di APEC. China juga telah mencoba untuk memblokir banyak permohonan yang dibuat oleh Taiwan di APEC. Namun di lain sisi, Amerika Serikat selalu mendukung keanggotaan penuh Taiwan di APEC dan memastikan bahwa statusnya tidak akan berubah (Focustaiwan, 2018).

Para pemimpin negara dapat melakukan kunjungan diplomatik dan negara-negara dapat menyuarakan pendapat untuk Taiwan di PBB dan organisasi internasional lainnya. Taiwan menganggap isolasi internasional menghambat pengakuan kedaulatan Taiwan serta tekanan dari China cenderung memperkuat identitas nasional Taiwan sebagai suatu provinsi. Pengakuan yang di dapatkan oleh Taiwan yaitu sebagai pemerintahan China yang sah, namun bukan sebagai negara yang berdaulat. Tidak ada dua pemerintah berdaulat dari suatu negara yang sama.

Taiwan adalah sebuah provinsi yang sedang memberontak untuk mengupayakan kemerdekaan di mata China. Status quo yang telah di sepakati oleh Taiwan dan China mengarah kepada ketidakpastian mengenai konflik yang terjadi antara kedua negara. Seiring berjalannya waktu, hubungan Taiwan dan China tidak pasti akan mengarah pada pemisahan atau penyatuan kembali. Tentu China tidak menginginkan apabila Taiwan berpisah dan menjadi negara yang merdeka. Berbagai cara dilakukan China untuk membatasi tindakan Taiwan dengan melakukan aksi militer jika langkah Taiwan untuk merdeka sudah bulat.

Hubungan Taiwan dengan ASEAN mengalami kendala karena ketiadaan hubungan diplomatik formal antara Taiwan dengan negara-negara di kawasan ASEAN. ASEAN lebih cenderung berpusat pada *One China Policy* sebagai pedoman dalam melakukan kebijakan luar negerinya. Taiwan saat ini hanya memiliki kurang dari 30 negara sebagai mitra diplomatiknya atau yang mengakui Taiwan sebagai negara yang utuh. Maka dari itu sebagai upaya untuk mendapat dukungan di komunitas internasional maka Taiwan mengadopsi “diplomasi ekonomi”. Sumber daya ekonomi yang meningkat dapat digunakan sebagai pertukaran politik dengan negara lain. Secara *soft power*, Taiwan telah berusaha dengan cara melakukan investasi, pertukaran budaya antar negara mitra NSP yang merupakan upaya diplomatik Taiwan agar mendapat pengakuan yang utuh (Herlijanto, 2016).

3.3.1 Taiwan-Indonesia

One China Policy adalah kebijakan dasar Pemerintah Republik Indonesia terhadap Pemerintah Republik Rakyat China (RRC). Pada tanggal 8 Agustus 1990,

para Menteri Luar Negeri menandatangani sebuah MOU yang menyatakan bahwa: Indonesia hanya menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan yang bersifat non-pemerintah dengan Taiwan (Cina Taipei). Taiwan menjadi salah satu investor dan mitra dagang terbesar Indonesia. Sesuai dengan MOU, kebijakan yang perlu dipatuhi oleh Indonesia harus bersifat non-pemerintah termasuk tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang utuh dan berdaulat (Kemenlu RI, 2012).

3.3.2 Taiwan-Australia

Australia memiliki hubungan substansial dengan Taiwan termasuk perdagangan dan investasi, pendidikan, pariwisata dan hubungan antar manusia. Namun, pada tahun 1972 terjadi pembentukan hubungan diplomatik Australia dengan China. *Australia's Joint Communiqué* dengan negara China mengakui bahwa Pemerintah China sebagai satu-satunya pemerintah hukum China, dan mengakui posisi Taiwan adalah provinsi dari China. Persyaratan *Joint Communiqué* yaitu dasar fundamental kebijakan Australia di China-Pemerintah Australia tidak mengakui ROC sebagai negara berdaulat dan tidak menganggap pihak berwenang di Taiwan memiliki status sebagai pemerintah nasional. Hubungan antara pejabat pemerintah Australia dan Taiwan terjalin secara tidak resmi. Pemerintah Australia sangat mendukung pengembangan hubungan secara tidak resmi, pada aspek ekonomi dan budaya dua arah. Australia mendukung keikutsertaan Taiwan dalam organisasi dan konferensi internasional jika diperlukan. Pemerintah mendorong bisnis Australia serta pemerintah negara bagian, teritori dan kota, untuk mengejar peluang perdagangan dan investasi yang melibatkan Taiwan dan mendukung pengembangan hubungan *people-to-people* (dilansir dari situs *Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade*).

3.3.3 Taiwan-Selandia Baru

Dilansir dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, meskipun Selandia Baru tidak mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan, namun tetap memiliki hubungan perdagangan, ekonomi, dan budaya yang

cukup besar. Taiwan adalah sumber penting dalam bidang impor, pariwisata dan investasi, dan pasar ekspor penting bagi Selandia Baru. Adanya kesempatan kerja untuk Selandia Baru di Taiwan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pertukaran budaya yang terus meningkat. Banyak orang Taiwan bermigrasi ke Selandia Baru sejak tahun 1990-an, sehingga memiliki populasi warga negara Taiwan yang tinggi di Auckland. Sejak tahun 2009, bidang pariwisata, pendidikan dan hubungan bisnis terus menguat sejak penghapusan visa (dikutip dari situs *New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade*).

3.3.4 Taiwan-India

Taiwan dan India tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Sejak tahun 1995, kedua belah pihak menjalin hubungan “substansial” dan saling “menguntungkan”. India tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, meskipun Taiwan telah dikelola secara terpisah dengan pemerintahnya sendiri sejak akhir perang sipil China pada tahun 1949 (Indiatoday, 2018). India telah konsisten dalam tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat yang independen sejak negara itu beralih pengakuan dari Republik China ke Republik Rakyat China pada tahun 1949. Pada tahun 1995, India menjalin hubungan dengan Taiwan di bawah pemahaman bahwa hubungan itu tidak didirikan di tingkat pemerintahan, tetapi hubungan *people-to-people* secara tidak resmi. Hal ini tetap tidak berubah, meskipun hubungan India-Taiwan semakin kuat. Selain itu, India telah berhenti mendukung Kebijakan Satu China dalam *Joint Communiqué* hubungan bilateral dengan China, namun India harus mematuhi hukum negara China (khususnya Kebijakan Satu China, yang tidak ditentang oleh negara India) untuk melakukan bisnis di China (Australian Institute of International Affairs, 2018).

Sebelum awal abad ini, semua *Joint Communiqué* pemerintah yang ditandatangani China dengan negara lain akan mengakui Taiwan sebagai bagian dari China. Prinsip Satu-China telah diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pernyataan bersama antara China dan India tidak menyebutkan Kebijakan Satu China. Pertemuan antara pemimpin

mereka juga tidak menyinggung masalah ini. Tetapi itu tidak berarti pemerintah India telah meninggalkan kebijakan ini (Globaltimes, 2018). Berdasarkan cuitan dari Presiden Tsai Ing-wen (@iingwen) pada tanggal 5 Mei 2017, menyatakan:

The #NewSouthboundPolicy isn't about making a political statement in region but how Taiwan can build more mutually beneficial relationships.

Maksud dari cuitan Tsai yaitu New Southbound Policy bukan mengenai pembuatan pernyataan politik di suatu kawasan, tetapi bagaimana Taiwan dapat membangun hubungan yang lebih untuk saling menguntungkan. Meskipun negara mitra NSP tidak menjalin hubungan diplomatik secara formal dengan Taiwan, tidak ada rasa kekecewaan oleh pemerintahan Taiwan. Kerjasama antar negara melibatkan berbagai bidang, tidak hanya bidang politik saja.

Taiwan akan memperluas visa untuk pengunjung dari Thailand, Brunei dan Filipina dan mempermudah proses permohonan visa bagi pengunjung dari negara Asia Tenggara dan Asia Selatan lainnya. Keputusan untuk melakukan perjalanan ke Taiwan lebih mudah bagi warga dari negara-negara mitra NSP. Taiwan bertujuan untuk mempromosikan *New Southbound Policy*.

Dimulai uji coba pada Agustus 2016, pengunjung dari Thailand dan Brunei ke Taiwan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun masing-masing sebesar 57,26 persen dan 52 persen. Langkah baru lainnya adalah memberikan fasilitas tanpa visa kepada para pengunjung dari Filipina. Sementara itu, Taiwan akan berupaya untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap pengunjung dari India, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Kamboja dan bebas visa terhadap Laos secara "bersyarat". Warga negara dari Sri Lanka dan Bhutan juga akan diizinkan untuk mengajukan permohonan visa turis ke Taiwan. Langkah-langkah yang diambil telah meningkatkan kunjungan ke Taiwan. Pemerintah Taiwan lebih memudahkan proses visa untuk mempromosikan pariwisata dan hubungan bisnis dengan kawasan ASEAN dan Asia Selatan (Focustaiwan, 2017).

Menurut Departemen Pendidikan Internasional Departemen Luar Negeri dan Lintas-Selat menyatakan pada tahun 2008, mahasiswa India dan Asia Tenggara yang mengambil studi sarjana dan pasca-sarjana di universitas Taiwan mencapai

sekitar 8.000 orang. Pada tahun 2016, mahasiswa dari negara-negara anggota ASEAN yang mengambil pendidikan di Taiwan sebesar 28.000 orang, pada tahun 2017 meningkat menjadi 38.000 orang. Taiwan bertujuan untuk meningkatkan jumlah siswa dari negara-negara ASEAN menjadi 58.000 pada tahun 2019. Berdasarkan kebijakan pemerintah terbaru tentang peningkatan pendidikan, Taiwan tidak hanya berfokus dalam negeri, tetapi juga menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga dan menarik lebih banyak siswa sebagai bagian dari NSP yaitu sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan Negara-negara ASEAN dan negara-negara Asia Selatan, serta Australia dan Selandia Baru (Focustaiwan, 2018).

Pada September 2017, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, menyatakan bahwa komunitas Muslim adalah mitra penting Taiwan dan kekuatan yang sangat diperlukan untuk mempromosikan NSP. Warga Muslim dan penduduk menjadi jembatan yang menghubungkan negara dengan dunia Islam. Diharapkan dapat terus memperluas kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara mayoritas Muslim. Pemerintah mendirikan ruang-ruang doa di fasilitas transportasi umum seperti bandara, terminal bus dan stasiun kereta api. Pemerintah juga bekerja untuk menarik lebih banyak pengunjung Muslim melalui inisiatif seperti mempromosikan sertifikasi halal untuk hotel dan restoran lokal. Dengan upaya ini, Taiwan menempati peringkat ketujuh sebagai negara tujuan paling ramah Muslim di antara negara-negara non-Muslim di *Global Travel Index* 2016, dilansir oleh *Master Card-Crescent Rating* (Taiwantoday, 2017).

3.4 Kepentingan Militer Taiwan di Negara Mitra NSP

Meningkatnya ketidakpastian situasi keamanan global menjadi salah satu tantangan berat yang harus dihadapi Taiwan. Ancaman militer oleh China terus dilakukan untuk membatasi perilaku Taiwan. Kekhawatiran mengenai serangan yang akan terjadi semakin berkembang sebagai ancaman keamanan seperti serangan *cybercrime* maupun melemahnya pertahanan nasional. Perlunya penguatan kekuatan pertahanan dan keamanan untuk menjaga keutuhan warga negaranya.

Tabel 3.5 Peringkat Kekuatan Militer di Dunia

NO.	COUNTRY
1.	UNITED STATES
2.	RUSSIA
3.	CHINA
4.	INDIA
5.	FRANCE
6.	UNITED KINGDOM
7.	SOUTH KOREA
8.	JAPAN
9.	TURKEY
10.	GERMANY
11.	ITALY
12.	EGYPT
13.	IRAN
14.	BRAZIL
15.	INDONESIA
16.	ISRAEL
17.	PAKISTAN
18.	NORTH KOREA
19.	SPAIN
20.	VIETNAM
21.	AUSTRALIA
22.	POLAND
23.	ALGERIA
24.	TAIWAN
25.	CANADA

(Sumber: diolah dari Global Firepower. 2018. *2018 Military Strength Ranking*. Di akses melalui <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp> Pada 8 Oktober 2018)

Untuk tahun 2018, total ada 136 negara yang termasuk dalam database GFP. Sesuai dengan data dari GFP tahun 2018, kekuatan militer Taiwan berada pada posisi ke-24. Negara-negara mitra NSP seperti India, Indonesia, Pakistan, Vietnam serta Australia berada di atas Taiwan. Secara militer, Taiwan mendapat banyak bantuan dari Amerika Serikat dan China. Taiwan berfokus untuk memperkuat kekuatan militernya sendiri. Sehingga masih sulit bagi Taiwan untuk melakukan hubungan secara militer dengan negara-negara NSP. Militer Taiwan ditingkatkan untuk membatasi dan melawan invasi militer yang dilakukan oleh China.

Kementerian Pertahanan Nasional (MND) Taiwan mengintegrasikan pertahanan nasional dengan diplomasi untuk mempromosikan pertukaran militer negara dengan tujuan membangun hubungan interpersonal dan mengamankan relasi dengan negara-negara lain. Dengan demikian bersama-sama memastikan keamanan Selat Taiwan sebagai suatu perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Melalui militer dan hubungan diplomatik serta kerjasama, dapat belajar pengetahuan baru dari negara maju di berbagai bidang seperti teknologi militer, konsep perencanaan kekuatan militer, pembelajaran operasional, serta pendidikan dan pelatihan militer. Sehingga dapat meningkatkan kesiapan tempur dan kekuatan dari Angkatan Bersenjata Taiwan.

Presiden Tsai Ing-wen mengatakan Taiwan akan meningkatkan anggaran pertahanannya setiap tahun, sementara mengembangkan industri pertahanan dalam negerinya. Tekanan dari China meningkat terhadap Taiwan karena dianggap menantang status quo di Selat Taiwan. Anggaran pertahanan negara akan ditingkatkan sebesar NT \$ 18,3 miliar (US \$592 juta) pada tahun 2019, tumbuh 5,6% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai NT \$327,7 miliar (US \$10,6 miliar). Anggaran pertahanan untuk tahun mendatang menyumbang sekitar 2,16 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Taiwan, tertinggi selama 10 tahun terakhir (Armyrecognition, 2018).

Amerika Serikat menyatakan bahwa Taiwan harus meningkatkan anggaran pertahanannya karena ketidakseimbangan kemampuan militer di Selat Taiwan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Maka dari itu Taiwan terus berupaya untuk memperkuat diri walaupun dengan cara kekerasan sekalipun.

Perencanaan militer nasional Taiwan dilakukan demi menjaga pembangunan keamanan nasional dan memastikan perdamaian regional. Peningkatan kekuatan militer Taiwan sebagai upaya Taiwan untuk menjaga keamanan dan perdamaian di Selat Taiwan. dukungan dari warga negara Taiwan serta dukungan dari negara-negara yang menerima bantuan dari Taiwan sangat diperlukan.

Apabila dibandingkan dengan kekuatan militer China, tentu anggaran belanja militer China jauh melebihi Taiwan serta lebih kuat secara militer. China memandang, peningkatan anggaran oleh Taiwan tidak akan mendatangkan perubahan apapun bagi kawasan Selat Taiwan. China membagi enam fokus isu yaitu sebagai berikut: (1) pernyataan kepemimpinan Taiwan, (2) Strategi pertahanan Taiwan, (3) latihan militer Taiwan, (4) Akuisisi senjata Taiwan, khususnya penjualan senjata AS, (5) pertukaran militer Taiwan dengan militer asing, dan (6) masalah/konflik militer Taiwan dan masalah lain yang berdampak negatif (RAND, 2017).

Tabel 3.6 Ekspor Senjata Dan Amunisi Taiwan Tahun 2014 (untuk Kawasan Asia Dan Oceania)

NO	COUNTRIES	YEAR		
		2014	2015	2016
1.	Indonesia	1.87%	11.48%	5.96%
2.	Singapore	0.62%	1.16%	0.07%
3.	Thailand	5.79%	4.11%	2.76%
4.	Malaysia	0.64%	0.62%	0.12%
5.	Phillippines	4.41%	21.51%	50.77%
6.	Vietnam	5.30%	2.21%	1.45%
7.	Cambodia			
8.	Laos			
9.	Myanmar		0.14%	0.08%
10.	Brunei	0.01%		0.00%

11.	Butan			
12.	Pakistan	0.03%	0.04%	0.01%
13.	India	0.11%	0.01%	0.07%
14.	Bangladesh	0.53%		
15.	Sri Lanka	0.05%	0.02%	0.00%
16.	Nepal	0.13%		
17.	Australia	9.85%	7.29%	1.57%
18.	New Zealand	10.44%	4.51%	1.38%

(Sumber: diolah dari Center for International Development at Harvard University (ATLAS). 2018. *Where did Taiwan export Arms and ammunition to in 2016?*. Di akses melalui <http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=249&partner=undefined&product=191&productClass=HS&startYear=undefined&target=Product&year=undefined> Pada 8 Oktober 2018)

Menurut tabel di atas, negara Filipina berada di posisi tertinggi sebagai negara tujuan ekspor senjata Taiwan yaitu sebesar 50,77% pada tahun 2016. Meskipun tidak sebesar ekspor Taiwan di bidang ekonomi namun Taiwan terus berupaya agar eksistensi Taiwan di bidang militer tetap terjaga salah satunya dengan cara mengekspor senjata ke negara-negara mitra NSP.

Hubungan Taiwan dengan Singapura berlanjut tidak hanya dalam urusan ekspor senjata saja, melainkan berlanjut pada pelatihan militer bersama. Sebelumnya pada tahun 1970-an, mantan Presiden Chiang Kai-shek dan Perdana Menteri Singapura menandatangani perjanjian militer rahasia bernama “*Project Starlight*”. Pada tahun 2016, Angkatan Bersenjata Singapura melakukan latihan militer bersama. Sejak saat itu, kedua pulau tersebut mengadakan latihan militer reguler. Singapura mengirim hingga 15.000 pasukan per tahun ke Taiwan (TheDiplomat, 2016).

Taiwan terus berupaya untuk melakukan kerjasama dalam segala bidang, termasuk bidang militer secara meluas. Di lain sisi, upaya Taiwan ini mendapat kecaman dari pemerintah China yang secara tegas menentang segala bentuk interaksi resmi antara Taiwan dan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik, pertukaran militer dan kerjasama. Meskipun secara militer kerjasama

Taiwan dengan negara mitra NSP masih kurang, namun Taiwan terus berupaya untuk berbenah diri agar keamanan nasional Taiwan di kawasan tetap terjaga dengan baik.



BAB V KESIMPULAN

Skripsi ini membahas tentang reaksi China terhadap kebijakan luar negeri: *New Southbound Policy*. Terdapat dua faktor mengapa China bereaksi terhadap kebijakan luar negeri baru Taiwan. Pertama implementasi kebijakan *One China Policy*, Kedua terbentuknya kebijakan *New Southbound Policy*. Dalam penelitian ini penulis memadukan konsep politik luar negeri dan pendekatan realisme. Kajian dari penelitian ini menarik dalam keilmuan hubungan internasional karena kebijakan *One China Policy* yang menyatakan hanya ada satu China yang berdaulat secara utuh nyatanya tidak mengurangi upaya Taiwan untuk melepaskan diri dari pengaruh China. Terbukti pada tahun 2016, Taiwan membentuk kebijakan *New Southbound Policy* untuk meningkatkan hubungan Taiwan dengan negara-negara mitra NSP sehingga menjadikan peluang untuk reunifikasi China-Taiwan terhambat. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada bagaimana reaksi China terhadap kebijakan *New Southbound Policy*.

China berupaya untuk terus menarik kembali Taiwan untuk bersatu. Dengan diterapkannya *One China Policy*, yaitu sebuah kebijakan yang mengakui hanya ada satu China yang berdaulat. Terbentuknya *One China Policy* ditandai dengan PBB menarik delegasi China yang awalnya adalah Taiwan dan menggantikannya dengan delegasi China. Sehingga ruang gerak Taiwan dalam komunitas internasional menjadi terbatas. Sejak Taiwan memisahkan diri pada tahun 1949, Amerika Serikat telah menjadi kawan Taiwan dan membantu Taiwan dalam mengurangi pengaruh dari China serta melawan ancaman dari China dengan menyediakan persenjataan AS terhadap Taiwan. Hal ini yang membuat China merasa terganggu dan bersikap waspada.

Pascaterpilihnya Presiden Tsai Ing-wen pada tahun 2016, Taiwan semakin berani untuk mengurangi pengaruh China. Inisiatif Tsai Ing-wen membentuk *New Southbound Policy* (NSP) atau Kebijakan Menuju Selatan sebagai suatu kebijakan kerjasama antara Taiwan dengan ASEAN, Asia

Selatan, serta Australia dan New Zealand total ada 18 negara yang menjadi tujuan dari NSP. Kekuatan ekonomi Taiwan terus dikembangkan dengan menjalin relasi yang baik dengan negara-negara tetangganya, meskipun bukan hubungan secara diplomatik.

Berangkat dari konsep politik luar negeri dalam perspektif realisme, menjelaskan keterkaitan teori tersebut dengan reaksi China terhadap pembentukan kebijakan luar negeri baru Taiwan. China merasa terganggu dengan terbentuknya *New Southbound Policy*. Dalam bidang politik, kepentingan *good influence* China akan terganggu dengan kehadiran *New Southbound Policy*. Dalam bidang keamanan, China memperkuat militernya. Apabila militer China sudah kuat maka bisa membalikkan partai Koumintang atau KMT yang dinilai membangkang terhadap wilayah China.

Reaksi China terhadap NSP meliputi bidang ekonomi, politik serta militer. Dalam bidang ekonomi, China memperkuat hubungannya dengan negara-negara mitra OBOR. Dalam bidang politik, Dalam bidang politik, China semakin agresif dalam menekan Taiwan dalam hubungan lintas selat. China merasa memiliki ruang untuk melakukan hubungan internasional dengan dunia luar (secara resmi sebagai negara). Sehingga yang berhak memiliki atau wajib memiliki politik luar negeri, yaitu negara China. Dalam bidang keamanan, China memperkuat militernya. Apabila militer China sudah kuat maka bisa membalikkan partai Koumintang atau KMT yang dinilai membangkang terhadap wilayah China. Kebijakan luar negeri NSP tampak berlebihan karena Taiwan tidak di akui sebagai negara. Dan itu merupakan pengurangan kekuatan absolut dari China, karena dunia luar menganggap ada dua China dengan dibentuknya NSP. Padahal meskipun tidak harus mempunyai politik luar negeri, Taiwan dengan Amerika Serikat dan negara-negara tujuan NSP serta negara lain di belahan dunia telah menjalankan relasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Conny, R. Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, Hal.1-3.
- Djafar, Zainuddin. 1996. *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: PT DUNIA PUSTAKA JAYA.
- Dugis, Vinsensio. 2016. *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.
- Eby Hara, Abu Bakar. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: NUANSA.
- Frankel, Joseph. 1991. Hubungan Internasional. Jakarta: BUMI AKSARA. Hal. 84-85
- Kementerian Luar Negeri, Republic of China (ROC). 2018. *Sekilas Taiwan 2018-2019*. Taiwan: Red & Blue Color Printing CO., Ltd
- McDougall, Derek, 2007. *Asia Pasific in World Politics*. USA : Lynne Rienner.
- Nasution, Dahlan. 1998. *Politik Internasional Konsep dan Teori*. Bandung: Gelora Aksara Pratama. Hal. 65
- Robyn, Meredith. 2010. *Menjadi Raksasa Dunia*. Bandung: Nuansa
- Tanasaldy, Taufiq. 2017. *Hubungan Luar Negeri Taiwan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Yani, Yanyan M. 2006. *PENGANTAR ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Wicaksono, Michael. 2015. *Republik Tiongkok (1912-1949)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Jurnal

- Bing, Ngeow Chow. 2017. *Taiwan's Go South Policy: Deja vu All Over Again?*, Contemporary Southeast Asia, Vol, 39, No, 1.
- Chen, Ezra NH. 2003. The Economic Integration of Taiwan and China and its Implication for Cross Strait Relations. Weatherhead Center of International Affair, Harvard University.
- Dara, Silfiana. PEMBANGUNAN EKONOMI CINA BERDASARKAN TEORI DENG XIAOPING DAN KONSEP TIGA PERWAKILAN. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 6, Nomor 3, 2018: 1065-1078
- Dugis, Vinsensio. 2008. "Explaining Foreign Policy Change". *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th. XXI. No. 2, April-Juni 2008, 101-104.
- Glaser, Bonnie S., Kennedy Scott, Mitchell Derek, Funaiole Matthew P. 2018. The New Southbound Policy: Deepening Taiwan's Regional Integration. CSIS: A Report Of The CSIS China Power Project, ISBN: 978-1-4422-8053-3 (pb); 978-1-4422-8054-0
- Harmini, Sri dan Nusyirwan. 2004. Konsep Revolusi Kebudayaan Menurut Mao Zedong. *Jurnal Filsafat*, April 2004, Jilid 36, Nomor 1
- Herlijanto, Johanes. 2016. "Economic Diplomacy, Soft Power, and Taiwan's Relations with Indonesia". *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal* Vol. 2, No. 3, Dec. 2016, pp. 1173-1194
- Ian Easton, Mark Stokes, Cortez A. Cooper, Arthur Chan. 2017. Transformation of Taiwan's Reserve Force. Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif ISBN: 978-0-8330-9706-4
- Lai, David. 2010. "Arms Sales To Taiwan: Enjoy The Business While It Lasts", *Of Interest Strategic Studies Institute (SSI)*, May 3, 2010, hlm. 3.

- Lai, David. 2011. "THE UNITED STATES AND CHINA IN POWER TRANSITION." Department of the Army, the Department of Defense, or the U.S. Government. Authors of Strategic Studies Institute (SSI), ISBN 1-58487-515-1.
- Maulana, M. Fahrezal. 2016. "Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia Dan Taiwan Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- Mubah, Safril. A. 2014. "Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan dalam Hubungan China dan Amerika Serikat." *Global & Strategis*, Th. 8, No. 2, Juli-Desember 2014335.
- Prasetya, Dion Maulana. 2005. "Strategi Defensif China Dalam Merespon Kebijakan Amerika Serikat Atas Taiwan." *Jurnal Studi Hubungan Internasional* 2 (1).
- Robert Ross, "Navigating the Taiwan Strait: Deterrence, Escalation Dominance, and U.S.-China Relations", *International Security*, Vol. 27, No. 2 (Fall 2002), hlm. 48–85
- Robert S. Ross, "Bipolarity and Balancing in East Asia" dalam T.V. Paul, James J. Wirtz, and Michel Fortmann (Ed.), *Balance of power: theory and practice in the 21st century*, California: Stanford University Press. 2004, hlm. 267.
- Sanchita, Basu Das. 2018. "Do the Economic Ties between ASEAN and China Affect Their Strategic Partnership?." Yusof Ishak Institute Analyse Current Events. Lead Researcher for Economic Affairs at Yusof Ishak Institute, ISSN 2335-6677
- Schubert, Gunter and Shu Keng. 2010. *Agents of Taiwan-China Unification? The Political Roles of Taiwanese Business People in the Process of Cross-Strait Integration*. Regents of the University of California. *Asian Survey*, Vol. 50, Number 2, pp. 287–310. ISSN 0004-4687

Sujadmiko, Bayu. 2012. "Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo)." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, ISSN 1978-5186.

Buku Panduan

Kementerian Luar Negeri Indonesia. 2012. Panduan umum tata cara hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah revisi tahun 2006.

Artikel

Schubert, Gunter, Lin Rui-Hua, And Tseng Yu-Chen. 2016. Taishang Studies: A Rising or Declining Research Field?. *China Perspective*. No. 2016/1

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2016. *Laporan Akhir Maritime Silk Road*. Jakarta.

Internet

Academiaedu. 2015. "Kebijakan Pertahanan China Era Xi Jinping." https://www.academia.edu/17508314/Kebijakan_Pertahanan_China_Era_Xi_Jinping. Di akses tanggal 30 Mei 2018

Academiaedu. 2016. Geografi Regional Dunia Asia Selatan. Dalam http://www.academia.edu/30902289/GEOGRAFI_REGIONAL_DUNIA_A_ASIA_SELATAN. Di akses pada tanggal 27 Desember 2018

Armyrecognition. 2018. Taiwan to increase defense budget. Dalam https://www.armyrecognition.com/october_2018_global_defense_security_army_news_industry/taiwan_to_increase_defense_budget.html. Di akses pada tanggal 12 Oktober 2018

Asia Times. 2018. Would Trump back an independence bid by Taiwan?. Dalam <http://www.atimes.com/trump-back-independence-bid-taiwan/>. Di akses pada tanggal 6 November 2018

Australian Government (Department of Foreign Affairs and Trade). Australia-Taiwan relationship. Dalam <https://dfat.gov.au/geo/taiwan/Pages/australia-taiwan-relationship.aspx>. Di akses pada tanggal 11 Oktober 2018

Australian Institute of International Affairs. 2018. Will India Reaffirm Support for One-China?. Dalam <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/will-india-reaffirm-support-for-one-china/>. Di akses pada tanggal 11 Oktober 2018

BBC. 2010. China hits back at US over Taiwan weapons sale. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8488765.stm>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018

BBC. 2017. What is the 'One China' policy?. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-38285354>. Di akses pada tanggal 18 September 2018

BBC. 2017. Taiwan: How China is poaching the island's diplomatic allies. Dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-40263581>. Di akses pada tanggal 10 Oktober 2018

BBC. 2018. Six ways China could retaliate in a trade war. Dalam <https://www.bbc.com/news/business-44763110>. Di akses pada tanggal 30 Oktober 2018

BNP2TKI. 2016. Data penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia:

Periode November 2016. Dalam http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_09122016_122020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_S.D_November_2016_.pdf. Di akses pada tanggal 9 Oktober 2018

Brookings. 2018. Taiwan's engagement with Southeast Asia is making progress under the New Southbound Policy. Dalam <https://www.brookings.edu/opinions/taiwans-engagement-with-southeast-asia-is-making-progress-under-the-new-southbound-policy/>. Di akses pada tanggal 9 Oktober 2018

Business Insider. 2018. White House slams China's 'Orwellian' demand that 36 foreign airlines change references to Taiwan. Dalam <https://www.businessinsider.sg/white-house-slams-chinas-Orwellian-demands-to-airlines-over-taiwan-2018-5/?r=US&IR=T>. Di akses pada tanggal 5 November 2018

Center For Strategic & International Studies - CSIS. 2018. "Xi Jinping and the Removal of Presidential Term Limits in China | Center for Strategic and International Studies." 2018. <https://www.csis.org/analysis/pacnet-29-xi-jinping-and-removal-presidential-term-limits-china>. Di akses tanggal 7 Juli 2018

China Daily. 2004. Gloomy prospects for 'Go South' policy. Dalam http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/200406/21/content_341085.htm. Di akses pada tanggal 10 Januari 2019

CNBC Indonesia. 2018. "Alasan Xi Jinping Ingin Jadi Presiden China Seumur Hidup." 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180312161557-4-6976/alasan-xi-jinping-ingin-jadi-presiden-china-seumur-hidup>. Di akses tanggal 2 Juli 2018

CNN Indonesia. 2016. "Oposisi Menang, Taiwan Punya Presiden Perempuan Pertama." 2016. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160117132058-113-104814/oposisi-menang-taiwan-punya-presiden-perempuan-pertama>. Di akses tanggal 28 Februari 2018

- CNN Indonesia. 2017. "Xi Jinping Bertekad Gagalkan Segala Upaya Kemerdekaan Taiwan." 2017.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171019110553-113-249417/xi-jinping-bertekad-gagalkan-segala-upaya-kemerdekaan-taiwan>. Di akses tanggal 30 Mei 2018
- CNN Indonesia. 2018. Media Pemerintah China Sebut Beijing Mesti Siap Gempur Taiwan. Dalam
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180322074808-113-284927/media-pemerintah-china-sebut-beijing-mesti-siap-gempur-taiwan>. Di akses pada tanggal 6 November 2018
- CNN Indonesia. 2018. China Tuntut AS Hentikan Penjualan Senjata ke Taiwan. Dalam
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180409193648-113-289540/china-tuntut-as-hentikan-penjualan-senjata-ke-taiwan>. Di akses pada tanggal 6 November 2018
- CNN Indonesia. 2018. "Media Pemerintah China Sebut Beijing Mesti Siap Gempur Taiwan." 2018.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180322074808-113-284927/media-pemerintah-china-sebut-beijing-mesti-siap-gempur-taiwan>. Di akses tanggal 30 Mei 2018
- CNN. 2018. China's release of images reinforces vow to keep Taiwan as a territory. Dalam
<https://edition.cnn.com/2018/04/29/asia/china-taiwan-air-force-video-intl/index.html>. Di akses pada tanggal 6 November 2018
- Council on Foreign Relations (CFR). 2018. China-Taiwan Relations. Dalam
<https://www.cfr.org/background/china-taiwan-relations>. Di akses pada tanggal 5 November 2018
- Council on Foreign Relations (CFR). 2018. Is Washington Boosting Ties With Taiwan?. Dalam
<https://www.cfr.org/interview/washington-boosting-ties-taiwan>. Di akses pada tanggal 5 November 2018

- Crsreport (Congressional Research Service). 2001. China/Taiwan: Evolution of the “One China” Policy—Key Statements from Washington, Beijing, and Taipei. Dalam <https://www.everycrsreport.com/reports/RL30341.html>. Di akses pada tanggal 28 Oktober 2018
- CSIS. 2013. Taiwan’s Quest for Greater Participation in the International Community. Dalam https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/131121_Glaser_TaiwansQuest_WEB.pdf. Di akses pada tanggal 5 November 2018
- Dumbaugh, Kerry. 1998. Taiwan: Texts of the Taiwan Relations Act, the U.S. - China Communiques, and the "Six Assurances", Congressional Research Service. <https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc821031/>. Di akses pada tanggal 18 September 2018.
- Election Study Center. 2017. “Taiwanese/Chinese Identification Trend Distribution in Taiwan”. <http://esc.nccu.edu.tw/app/news.php?Sn=166>. Di akses pada tanggal 19 September 2018
- Epochtimesid. 2018. Pandangan Tentang ‘One Belt, One Road’ Kebijakan Tiongkok. Dalam <https://epochtimes.id/2018/01/11/pandangan-tentang-one-belt-one-road-kebijakan-tiongkok/>. Di akses pada tanggal 10 Januari 2019
- European Council on Foreign Relations (ECFR). 2017. China Analysis Taiwan Between Xi and Trump. Diakses melalui <https://www.scribd.com/document/366081209/China-Analysis-Taiwan-Between-Xi-and-Trump>. Pada 18 September 2018
- FEB UGM. 2018. SILK ROAD 21 CENTURY: ECONOMICAL INNOVATION OR POLITICAL CONSOLIDATION. Dalam <https://bem.feb.ugm.ac.id/1304-2/>. Di akses pada tanggal 10 Januari 2019

- Focustaiwan. 2017. Taiwan to expand visa privileges for Southeast Asian visitors. Dalam <http://focustaiwan.tw/news/aipl/201704120011.aspx>. Di akses pada tanggal 11 Oktober 2018
- Focustaiwan. 2018. Taiwan universities see rise in number of Southeast Asian students. Dalam <http://focustaiwan.tw/news/aedu/201810050024.aspx>. Di akses pada tanggal 11 Oktober 2018
- Focustaiwan. 2018. Taiwan's investment in China in 2017 down for 3rd consecutive year. Dalam <http://focustaiwan.tw/news/acs/201801220030.aspx>. Di akses pada tanggal 5 November 2018
- Focustaiwan. 2018. China's 'little tricks' won't hamper Taiwan in APEC: foreign minister. Dalam <http://focustaiwan.tw/news/aipl/201810040015.aspx?platform=hootsuite>. Di akses 10 Oktober 2018
- Focustaiwan. 2018. Taiwan committed to role in new 'Indo-Pacific Security Strategy'. Dalam <http://focustaiwan.tw/news/aipl/201803110004.aspx>. Di akses pada tanggal 6 November 2018
- Globaltimes. 2018. Indian scholars wrong in equating territory row with Taiwan status. Dalam <http://www.globaltimes.cn/content/1109288.shtml>. Di akses pada tanggal 11 Oktober 2018
- Indiatoday. 2018. Keep relations with China and Taiwan separate: Taiwanese representative tells India. Dalam <https://www.indiatoday.in/mail-today/story/keep-relations-with-china-and-taiwan-separate-taiwanese-representative-tells-india-1278792-2018-07-06>. Di akses pada tanggal 11 Oktober 2018
- Ministry of Economic Affairs ROC (Taiwan). 2012. "Taiwan Investment in ASEAN Countries," Department of Investment Services, <http://www.aseancenter.org.tw/upload/files/20130111.pdf>. Di akses pada tanggal 10 Januari 2019

Ministry of Foreign Affairs, Republic of China. 2016. "The Guidelines for "New Southbound Policy" - Taipei Economic and Cultural Office in Brunei Darussalam 駐汶萊台北經濟文化辦事處." 2016. https://www.roc-taiwan.org/bn_en/post/644.html. Di akses tanggal 7 Juli 2018

Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China. 2017. Speech by Foreign Minister Wang Yi at the Opening of Symposium on International Developments and China's Diplomacy in 2017. Dalam https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1518130.shtml. Di akses pada tanggal 7 November 2018

Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). 2017. Pidato Kenegaraan Presiden Tsai dalam HUT ROC 2017. <https://nspp.mofa.gov.tw/nsppid/news.php?post=124283&unit=433>. Di akses pada tanggal 13 September 2018

Ministry of Foreign Affairs, Republic of China (Taiwan). 2018. Wapres Chen: NSP Membuahkan Hasil, Wisatawan dari Negara Mitra Tumbuh 30%. <https://nspp.mofa.gov.tw/nsppid/news.php?post=130280&unit=433>. Di akses pada tanggal 13 September 2018

Ministry of Foreign Affairs Republic Of China (MOFA). 2018. Pernyataan Presiden Tsai Terkait Pemutusan Hubungan Dengan Burkina Faso. Dalam <https://nspp.mofa.gov.tw/nsppid/news.php?post=135049&unit=434>. Di akses pada tanggal 5 November 2018

Ministry of Foreign Affairs Republic Of China (MOFA). 2018. Presiden Tsai: Perdamaian di Kawasan Asia Pasifik adalah Tujuan Bersama. Dalam <https://nspp.mofa.gov.tw/nsppid/news.php?post=127787&unit=433>. Di akses pada tanggal 5 November 2018

- MOEAIC (Investment Commission, Ministry of Economic Affairs). 2018. Statistics on Approved Overseas Chinese and Foreign Investment by Area. Dalam https://www.moeaic.gov.tw/english/news_bsAn.jsp. Di akses pada tanggal 9 Oktober 2018
- MOFA. 2017. Tsai: Kebijakan Menuju Asia Selatan Baru Eratkan Taiwan Dengan Dunia Internasional. Dalam <https://nspp.mofa.gov.tw/nsppid/news.php?post=124299&unit=434>. Di akses pada tanggal 9 Oktober 2018
- MOFA. 2018. Dorong NSP, MOFA akan Undang Tenaga Profesional dari 16 Negara. Dalam <https://nspp.mofa.gov.tw/nsppid/news.php?post=128247&unit=434>. Di akses pada tanggal 8 Oktober 2018
- MOFA. 2018. Yuan Eksekutif Harapkan NSP Dorong Kemakmuran dan Pembangunan Kawasan. Dalam <https://nspp.mofa.gov.tw/nsppid/news.php?post=128303&unit=434>. Di akses pada tanggal 8 Oktober 2018
- MOFA. 2018. Pertumbuhan Ekspor-Impor Tahun 2017 Tertinggi Dalam 7 Tahun Terakhir. Dalam <https://nspp.mofa.gov.tw/nsppid/news.php?post=127754&unit=434>. Di akses pada tanggal 9 Oktober 2018
- New Southbound Policy. 2016. New Southbound Policy implementation plans. <https://www.newsouthboundpolicy.tw/English/PageDetail.aspx?id=4a926ddb-4e3d-463e-998b-81ff96f284fe&pageType=SouthPolicy>. Di akses pada tanggal 12 September 2018
- New Southbound Policy. 2016. Panduan Layanan Arah Selatan Baru – Indonesia. <https://www.newsouthboundpolicy.tw/common/.../新南向服務指南-印尼1114.pdf>. Di akses pada tanggal 12 September 2018

New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. Dalam <https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/north-asia/taiwan/>. Di akses pada tanggal 11 Oktober 2018

UN Comtrade (The UN International Trade Statistics Database). 2018. 10 Barang Utama Ekspor ke Australia. Dalam <https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-vis/?reporter=156&partner=36&type=C&year=2017&flow=2&commodity>. Di akses pada tanggal 3 November 2018

QUARTZ. 2016. The charts that show how Trump's "One China" statements could jeopardize Taiwan's economy. Dalam <https://qz.com/861507/charted-taiwans-economy-is-more-dependent-on-china-than-ever-before-making-trumps-threats-dangerous/>. Di akses pada tanggal 3 November 2018

ROC Yearbook. 2016. Foreign Policy. Dalam <https://english.ey.gov.tw/cp.aspx?n=AAA55B728159E214>. Di akses pada tanggal 10 Oktober 2018

SCMP. 2016. What is the one-China policy and how did it become the bedrock of Sino-US ties?. Dalam <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2053881/what-one-china-policy-and-how-did-it-become-bedrock>. Di akses pada tanggal 27 Oktober 2018

South China Morning Post (SCMP). 2018. US, Taiwan military ties closer than ever as Donald Trump challenges Beijing. Dalam <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2170449/us-taiwan-military-ties-closer-ever-donald-trump-challenges>. Di akses pada tanggal 6 November 2018

SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA (SKSG UI). 2019. Diskusi Tentang Belt & Road Initiative Tiongkok dan Dampaknya Terhadap Eropa dan Asia Tenggara. Dalam <http://sksg.ui.ac.id/diskusi-tentang-belt-road-initiative-tiongkok-dan->

dampaknya-terhadap-eropa-dan-asia-tenggara. Di akses pada tanggal 10 Januari 2019

Taiwantoday. 2017. Tsai lauds Muslim role in advancing New Southbound Policy. Dalam <https://taiwantoday.tw/news.php?unit=10&post=121764>. Di akses pada tanggal 11 Oktober 2018

Taiwaninsight. 2017. TAIWAN'S SOUTHBOUND PRACTICES VS. CHINA'S BELT & ROAD. Dalam <https://taiwaninsight.org/2017/10/04/taiwans-southbound-practices-vs-chinas-belt-road/>. Di akses pada tanggal 10 Januari 2019

Taiwan National Statistics. 2018. Dalam <http://www.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=32985&CtNode=4944&mp=4>. Di akses pada tanggal 10 Januari 2019

Taiwan Today. 2018. Dukungan Negara Sahabat Terus Mengalir, MOFA Ucapkan Terima Kasih. Dalam <https://id.taiwantoday.tw/news.php?unit=463&post=134851>. Di akses pada tanggal 5 November 2018

Taiwannews. 2018. More young Taiwanese seeking employment in Southeast Asia and India. Dalam <https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3542355>. Di akses pada tanggal 9 Oktober 2018

Taiwannews. 2018. 14 countries cut diplomatic ties with Taiwan due to China pressure in 18 years. Dalam <https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3440023>. Di akses pada tanggal 10 Oktober 2018

TheDiplomat. 2016. China Protests Singapore's Military Exercise With Taiwan. Dalam <https://thediplomat.com/2016/11/china-protests-singapores-military-exercise-with-taiwan/>. Di akses pada tanggal 12 Oktober 2018

The New York Times. 2001. Taiwan Lifts Restrictions on Investment in China. Dalam <https://www.nytimes.com/2001/11/08/world/taiwan-lifts-restrictions-on-investment-in-china.html>. Di akses pada tanggal 10 Januari 2019

The National Interest. 2016. America Can't Dump Taiwan. Dalam <https://nationalinterest.org/feature/america-cant-dump-taiwan-17040>. Di akses pada tanggal 27 Oktober 2018

The U.S. Chamber of Commerce. 2016. ASEAN Business Outlook Survey 2017. Dalam <https://www.uschamber.com/report/asean-business-outlook-survey-2017>. Di akses pada tanggal 5 November 2018

The Washington Post Company. 1998. Taiwan Buys Up Bargains And Widens Its Influence. Dalam <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/business/longterm/asiaecon/stories/taiwan012298.htm>. Di akses pada tanggal 10 Januari 2019

U.S. State Department. 2018. U.S.-TAIWAN RELATIONS. Dalam <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35855.htm>. Di akses pada tanggal 27 Oktober 2018

World Economic Forum (WEF). 2018, Peringkat Negara dengan Ekonomi Terbesar di Dunia. Dalam <https://www.weforum.org/agenda/2018/04/the-worlds-biggest-economies-in-2018>. Di akses pada tanggal 3 November 2018

Yanyan Mochamad Yani, MAIR., and Ph.D. 2016. "Politik Luar Negeri." <http://repository.unpad.ac.id/4390/>. Di akses tanggal 7 Juli 2018